

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/476 TAHUN 2025****TENTANG****PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan data statistik guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, telah dilaksanakan tahap perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterisian data dan tata kelola penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyebaran Data Statistik Sektoral Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 555.1/15 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI); dan
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 hal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-20245 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196709221989031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/476 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL
DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	01.01.1938	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5
2	01.01.1976	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan khusus	0
3	01.01.1991	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	25352
4	01.01.0104	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	72572
5	01.01.0118	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	25859
6	01.01.0121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	188
7	01.01.0131	Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	1302040
8	01.01.0134	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
9	01.01.0135	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	462743
10	01.01.0207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	58672
11	01.01.0221	Ruang laboratorium IPA yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang layak	4231
12	01.01.0222	Ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	1427
13	01.01.0225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang layak	669
14	01.01.0227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	jumlah ruang laboratorium bahasa yang tersedia	433
15	01.01.0230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia	691
16	01.01.0232	Ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	43
17	01.01.0235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	Jumlah ruang laboratorium fisika	665
18	01.01.0242	Ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	1427
19	01.01.0244	Ruang laboratorium kimia	Ruang	Jumlah ruang laboratorium kimia	664
20	01.01.0249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	Jumlah ruang laboratorium komputer	1456
21	01.01.0290	Ruang TU yang layak	Ruang	Jumlah ruang TU yang layak	2403
22	01.01.0377	Satuan pendidikan yang belum memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang belum memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	37
23	01.01.0381	Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	41
24	01.01.0382	Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0
25	01.01.0385	Satuan pendidikan yang memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana mobilitas sekolah	4
26	01.01.0397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang sudah memiliki alat praktik dan peraga peserta didik	0
27	01.01.0406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah menengah atas yang mengelola dana bos	853
28	01.01.0407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang mengelola dana bos	1528

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	01.01.0436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	Jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	0
30	01.01.0454	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas	5731
31	01.01.0455	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	1461
32	01.01.0471	Unit pendidikan khusus	Unit	Jumlah Unit Pendidikan Khusus yang tersedia	190
33	01.01.0477	Unit SMK	Unit	Jumlah unit SMK yang tersedia	1559
34	01.01.0589	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	0
35	01.01.0689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri	362
36	01.01.0690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Swasta	506
37	01.01.0691	Jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas	868
38	01.01.0692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri	347588
39	01.01.0693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas Swasta	115960
40	01.01.0694	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas	463548
41	01.01.0695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	136831
42	01.01.0696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	54384
43	01.01.0697	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	191215
44	01.01.0698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	210757
45	01.01.0699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	61576
46	01.01.0700	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	272333

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
47	01.01.0701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	117663
48	01.01.0702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	41038
49	01.01.0703	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 atau kelas 10	158701
50	01.01.0704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	116439
51	01.01.0705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	38145
52	01.01.0706	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 atau kelas 11	154584
53	01.01.0707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	113486
54	01.01.0708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	36777
55	01.01.0709	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 atau kelas 12	150263
56	01.01.0710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0
57	01.01.0711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	0
58	01.01.0712	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas	0
59	01.01.0713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0
60	01.01.0714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0
61	01.01.0716	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan negeri	0
62	01.01.0717	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0
63	01.01.0725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri	3855

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
64	01.01.0726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Swasta	2672
65	01.01.0727	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas	6527
66	01.01.0728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	21
67	01.01.0729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	89
68	01.01.0730	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas	110
69	01.01.0731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri	61
70	01.01.0732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Swasta	165
71	01.01.0733	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas	226
72	01.01.0734	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri	18072
73	01.01.0735	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Swasta	7210
74	01.01.0736	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Atas	25282
75	01.01.0737	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	7839
76	01.01.0738	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	2914
77	01.01.0739	jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	10753
78	01.01.0740	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	10233
79	01.01.0741	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	4296

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
80	01.01.0742	jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	14529
81	01.01.0743	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	37
82	01.01.0744	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	198
83	01.01.0745	jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas	235
84	01.01.0746	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	18359
85	01.01.0747	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	7500
86	01.01.0748	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas	25859
87	01.01.0749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	4860
88	01.01.0750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	1748
89	01.01.0751	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	6608
90	01.01.0752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	3334
91	01.01.0753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	1520
92	01.01.0754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	4854
93	01.01.0755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	7069

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
94	01.01.0756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah SMA	2932
95	01.01.0757	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	10001
96	01.01.0758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah diatas SMA	1125
97	01.01.0759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah diatas SMA	336
98	01.01.0760	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berijazah diatas SMA	1461
99	01.01.0761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri	9852
100	01.01.0762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	3923
101	01.01.0763	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	13775
102	01.01.0764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	9954
103	01.01.0765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	5134
104	01.01.0766	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	Keseluruhan jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	15088
105	01.01.0767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Negeri	6190
106	01.01.0768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Swasta	3387
107	01.01.0769	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	9577
108	01.01.0770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	1846

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
109	01.01.0771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	1084
110	01.01.0772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	2930
111	01.01.0773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	1259
112	01.01.0774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	428
113	01.01.0775	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	1687
114	01.01.0776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Negeri	659
115	01.01.0777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Swasta	235
116	01.01.0778	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	894
117	01.01.0779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0
118	01.01.0780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0
119	01.01.0781	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	Jumlah keseluruhan ruang kelas yang mengalami rusak total	0
120	01.01.0782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah S1	8194
121	01.01.0783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah S1	3268
122	01.01.0784	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas yang memiliki ijazah Strata Satu	11462
123	01.01.0785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	239

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
124	01.01.0786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	1320
125	01.01.0787	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	JUMLAH TERSEDIA NYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA	1559
126	01.01.0788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	303.453
127	01.01.0790	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	823030
128	01.01.0791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	136670
129	01.01.0792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	331228
130	01.01.0793	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan	467898
131	01.01.0794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	166783
132	01.01.0795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	188349
133	01.01.0796	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	355132
134	01.01.0797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	102872
135	01.01.0798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berada pada tingkat 10 di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	184432
136	01.01.0800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	101.072
137	01.01.0801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	171589
138	01.01.0803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	97467

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
139	01.01.0804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	163178
140	01.01.0806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 13 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	2042
141	01.01.0807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berada pada tingkat 13 di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	378
142	01.01.0824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	70
143	01.01.0825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	833
144	01.01.0826	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	903
145	01.01.0827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	Jumlah Siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	95
146	01.01.0828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	Jumlah Siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	621
147	01.01.0829	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	Jumlah siswa putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	716
148	01.01.0830	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	16996
149	01.01.0831	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	28710
150	01.01.0832	jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	Jumlah Kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	45706
151	01.01.0833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru atau tenaga pendidik yang jenis berkelamin laki-laki pada di Menengah Kejuruan Negeri	8425
152	01.01.0834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	14697
153	01.01.0835	jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	23122

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
154	01.01.0836	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	8571
155	01.01.0837	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	14013
156	01.01.0838	jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	22584
157	01.01.0839	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang memiliki ijazah tingkat Strata atau S1	48
158	01.01.0840	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah dibawah S1	989
159	01.01.0841	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah keseluruhan Kepala Sekolah dan guru yang memiliki ijazah di bawah Strata Satu atau S1 pada Sekolah Menengah Kejuruan	1037
160	01.01.0842	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas	16948
161	01.01.0843	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas	27721
162	01.01.0844	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah keseluruhan Kepala Sekolah dan guru berijazah Strata Satu atau S1 ke atas pada Sekolah Menengah Kejuruan	44669
163	01.01.0845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	4146
164	01.01.0846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swastai	6678
165	01.01.0847	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	11024
166	01.01.0848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan do Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	2502

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
167	01.01.0849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	5792
168	01.01.0850	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	8294
169	01.01.0851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	5626
170	01.01.0852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	11563
171	01.01.0853	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	17189
172	01.01.0854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah di atas SMA negeri	Orang	Jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1022
173	01.01.0855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah di atas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	1107
174	01.01.0856	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah di atas SMA	Orang	Jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang berijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan	2129
175	01.01.0857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	8737
176	01.01.0858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	18839
177	01.01.0859	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	27576
178	01.01.0860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan negeri	7029
179	01.01.0861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan swasta	19819
180	01.01.0862	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	Jumlah keseluruhan ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan	26848
181	01.01.0863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	4697

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
182	01.01.0864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	12443
183	01.01.0865	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	Jumlah keseluruhan ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan	17140
184	01.01.0866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1744
185	01.01.0867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	5628
186	01.01.0868	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada Sekolah Menengah Kejuruan	7372
187	01.01.0869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	395
188	01.01.0870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	1321
189	01.01.0871	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak sedang pada Sekolah Menengah Kejuruan	1716
190	01.01.0872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	193
191	01.01.0873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	427
192	01.01.0874	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat pada Sekolah Menengah Kejuruan	620
193	01.01.0888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	0
194	01.01.0889	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2625

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	0
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	0
3	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	1.02.000007	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	0
5	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langganan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS	0
6	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	Jumlah Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Memiliki Izin	95
7	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kuantitas	Jumlah Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0
8	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	2878
9	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	494
10	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anesthesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anesthesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	393
11	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	355

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	155
13	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	525
14	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	180
15	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	207
16	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	302
17	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	128
18	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	608
19	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	244
20	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	207
21	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	74
22	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	11098
23	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat, Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	&Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Vaksin adalah suatu bentuk perlindungan atau imunisasi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu. Jumlah Dokumen distribusi alkes, obat, Vaksin, makanan, dan minuman ke faskes lainnya&	2
24	1.02.000042	Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	1.02.000043	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	0
26	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	5
27	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0
28	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20
29	1.02.000051	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	0
30	1.02.000052	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dokumen	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	0
31	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2
32	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
33	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	4
34	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4
35	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4
36	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2
37	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10
38	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2
39	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2
40	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
41	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0
42	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4
43	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0
44	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
45	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1
46	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
47	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0
48	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	25
49	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0
50	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
51	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	0
52	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	2746
53	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8729
54	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	0
55	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0
56	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	69
57	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	0
58	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	167
59	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	0
60	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	0
61	1.02.000089	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	0
62	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	0
63	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	0
64	1.02.000092	Handuk	Paket	Jumlah Handuk	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
65	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	0
66	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	0
67	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	0
68	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	783
69	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	408657
70	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	434071
71	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	201
72	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	2449
73	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	14070
74	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	0
75	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5
76	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	4
77	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0
78	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
79	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	9300978
80	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0
81	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	Jumlah layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	0
82	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	930
83	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	8
84	1.02.000115	obat, Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Jumlah obat, Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	0
85	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	98671
86	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	0
87	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	861554
88	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	435266
89	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	98671
90	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	0
91	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi masyarakat bidang kesehatan	0
92	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	0
93	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	0
94	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	Jumlah penyalahguna NAPZA	474

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
95	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0
96	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry	0
97	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD	0
98	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi	0
99	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	0
100	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	0
101	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif	0
102	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	0
103	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	0
104	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi	0
105	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi&	0
106	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	0
107	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	0
108	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran	0
109	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	0
110	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	639
111	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0
112	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	35
113	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	881
114	1.02.000165	RICU	Unit	Jumlah RICU	0
115	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	Jumlah Ruang administrasi	0
116	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	1
117	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah Ruang ASI	0
118	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	1
119	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	0
120	1.02.000171	Ruang dinas Nakes	Unit	Jumlah Ruang dinas Nakes	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
121	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	3
122	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	1
123	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	1
124	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Jumlah Ruang jaga petugas	0
125	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	1
126	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	0
127	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	0
128	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi	0
129	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	0
130	1.02.000181	Ruang kesesuhan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	0
131	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	Jumlah Ruang KIE	0
132	1.02.000183	Ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Ruang Laboratorium	0
133	1.02.000184	Ruang Laundry	Unit	Jumlah Ruang Laundry	0
134	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	0
135	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	5
136	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	1
137	1.02.000188	Ruang pemeriksaan khusus	Unit	Jumlah Ruang pemeriksaan khusus	0
138	1.02.000189	Ruang pemeriksaan umum	Unit	Jumlah Ruang pemeriksaan umum	0
139	1.02.000190	Ruang Penanggulangan Kebakaran	Unit	Jumlah Ruang Penanggulangan Kebakaran	1
140	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik	0
141	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	1
142	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	1
143	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	0
144	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	0
145	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	1
146	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	0
147	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	0
148	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	0
149	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	1
150	1.02.000201	Ruang rawat pasca persalinan	Unit	Jumlah Ruang rawat pasca persalinan	0
151	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	1
152	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	1
153	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	1
154	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat	0
155	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	Jumlah Ruang tunggu	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
156	1.02.000207	Rumah dinas Nakes	Unit	Jumlah Rumah dinas Nakes	0
157	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	361
158	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	34
159	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	34
160	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	20
161	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0
162	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0
163	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	194
164	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	315
165	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	315
166	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	0
167	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0
168	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0
169	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	121
170	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	8660
171	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	0
172	1.02.000227	Telemedicine	Unit	Jumlah Telemedicine	0
173	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	46564
174	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	18685
175	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	3010
176	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	30167
177	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
178	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	64543
179	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya&	0
180	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	888
181	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
182	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	2040
183	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	3744
184	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	34
185	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&	7691

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
186	1.02.000241	Tenaga keterampilan fisik	Orang	&Tenaga Keterampilan Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterampilan fisik&	2522
187	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&	9449
188	1.02.000243	Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem teknologi informasi kesehatan.	0
189	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.	121

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
190	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. &	0
191	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional. &	121
192	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	117
193	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
194	1.02.000266	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0
195	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	996
196	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	21662

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
197	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	21662
198	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	1
199	1.02.000274	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem teknologi informasi kesehatan.	0
200	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	Alat kesehatan	0
201	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	35
202	1.02.000277	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
203	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
204	1.02.000282	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
205	1.02.000285	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
206	1.02.000289	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
207	1.02.000290	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
208	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
209	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	0
210	1.02.000294	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
211	1.02.000298	Rumah Sakit yang memenuhi Kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi Kriteria sebagai wahana pendidikan	0
212	1.02.000299	Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	0
213	1.02.000300	Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	0
214	1.02.000301	Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Orang	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	0
215	1.02.000302	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	Jumlah tenaga pengajar ilmu kesehatan	0
216	1.02.000303	pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	0
217	1.02.000304	Balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	1
218	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5
219	1.02.000306	Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	Orang	Jumlah Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	37831220
220	1.02.000308	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	0
221	1.02.000309	Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	0
222	1.02.000310	Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	0
223	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
224	1.02.000314	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1
225	1.02.000315	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	1
226	1.02.000316	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	1
227	1.02.000318	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	01.03.1934	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan antar provinsi berbatasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	1
2	01.03.1939	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi.	0
3	01.03.1941	Berita Acara konsultasi publik I	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik I yang ditandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0
4	01.03.1942	Berita Acara konsultasi publik II	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik II yang ditandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0
5	01.03.1945	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	1
6	01.03.1946	Berita Acara rapat koordinasi/surat kesepakatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil rapat koordinasi antar provinsi yang berbatasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari setiap pemerintah daerah.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	01.03.1956	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	Surat Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi.	0
8	01.03.1966	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	11
9	01.03.1969	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	1
10	01.03.1970	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investasi jembatan	1
11	01.03.1971	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	0
12	01.03.1976	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	01.03.1983	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	1
14	01.03.1985	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0
15	01.03.1987	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0
16	01.03.1989	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0
17	01.03.0106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Provinsi adalah penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur (PP 21/2021)	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	01.03.0107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	1
19	01.03.0129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	3
20	01.03.0131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Provinsi yang disusun	1
21	01.03.0133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
22	01.03.0135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
23	01.03.0142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air - Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	01.03.0144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	1
25	01.03.0145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	0
26	01.03.0148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang disusun	11
27	01.03.0150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	1
28	01.03.0154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayanan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	1
29	01.03.0157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	0
30	01.03.0158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
31	01.03.0159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
32	01.03.0162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	1
33	01.03.0163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
34	01.03.0164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	2
35	01.03.0165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	2
36	01.03.0166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
37	01.03.0191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	1
38	01.03.0192	Flyover	Flyover	Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll	0
39	01.03.0196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	2056
40	01.03.0212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	0
41	01.03.0229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	1
42	01.03.0230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	2
43	01.03.0232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
44	01.03.0233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	708
45	01.03.0246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	354
46	01.03.0249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	2404,74
47	01.03.0251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	2607,1
48	01.03.0257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	1390,78
49	01.03.0258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0
50	01.03.0261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	2
51	01.03.0273	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Orang	Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya	0
52	01.03.0277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi hasil penyempurnaan oleh Pemda Provinsi dengan DPRD Provinsi yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
53	01.03.0282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Provinsi.	1
54	01.03.0284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	Peta digital dalam bentuk format shapefile (shp) yang diunggah dalam bentuk link google drive.	1
55	01.03.0295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	Notulensi Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	1
56	01.03.0297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	1
57	01.03.0302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Provinsi	1
58	01.03.0305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	0
59	01.03.0308	Rumah Negara	Rumah Negara		0
60	01.03.0343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan di tanda tangani oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	0
61	01.03.0344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur, dan surat permohonan fasilitasi Ranperkada RDTR yang ditujukan kepada Gubenur.	26

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
62	01.03.0346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	Surat Permohonan Evaluasi Raperda RTRW Provinsi ditandatangani oleh Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri	1
63	01.03.0348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	1
64	01.03.0349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	Surat Persetujuan substansi di tandatangi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	1
65	01.03.0353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di tandatangi oleh Gubernur	1
66	01.03.0364	Underpass	Underpass	jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll	0
67	01.03.0389	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau bekerja pada kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
68	01.03.0401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB. &	0
69	01.03.0416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau produk konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0
70	01.03.0420	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	1
71	01.03.0431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	1
72	01.03.0432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli	1
73	01.03.0434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk	0
74	01.03.0435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
75	01.03.0436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0
76	01.03.0437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0
77	01.03.0438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	0
78	01.03.0442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	1
79	01.03.0445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	1
80	01.03.0446	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	1
81	01.03.0451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
82	01.03.0453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pembokoran Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya diantaranya adalah dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dan dokumen pelaksanaan pembongkaran	0
83	01.03.0454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	1
84	01.03.0456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Pegawasan Pembangunan Gedung adalah terkait Laporan pengawasan dari konsultan MK/ supervisi yang dilaporkan setiap bulan	1
85	01.03.0458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
86	01.03.0459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
87	01.03.0461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	1
88	01.03.0469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	1
89	01.03.0471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	1
90	01.03.0474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
91	01.03.0475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	1
92	01.03.0478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (catchment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak	1
93	01.03.0479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen yang berisi tentang kapasitas air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum	0
94	01.03.0483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	1
95	01.03.0485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	Dokumen roadmap sanitasi Provinsi adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.	1
96	01.03.0487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
97	01.03.0491	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.	1
98	01.03.0493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Ahli paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	0
99	01.03.0496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	1
100	01.03.0500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	35
101	01.03.0501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota	1. Bimbingan Teknis Dan Pengawasan & Evaluasi PP 16/2021 2. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara 3. Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara	35
102	01.03.0505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	1
103	01.03.0506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
104	01.03.0507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	0
105	01.03.0508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	1
106	01.03.0509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan	0
107	01.03.0518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan/atau kegiatan konstruksi Lintas Kabupaten/Kota yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha.	0
108	01.03.0527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	0
109	01.03.0529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
110	01.03.0531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penvediaan jaringan internet.	0
111	01.03.0538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	1
112	01.03.0543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&	0
113	01.03.0560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0
114	01.03.0561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	37
115	01.03.0568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	37
116	01.03.0569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli yang mencakup jenjang 7, 8, dan 9 di wilayah kewenangannya	0
117	01.03.0575	Jumlah TPST	Unit	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	0
118	01.03.0579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	M ³ /Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M ³	0
119	01.03.0602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin/krib, atau revetment dari susunan batu	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
120	01.03.0604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	2404,74
121	01.03.0614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	1
122	01.03.0639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	0
123	01.03.0641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung	0
124	01.03.0643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	1
125	01.03.0644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau/situ)	0
126	01.03.0649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	3.108
127	01.03.0650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
128	01.03.0651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
129	01.03.0662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
130	01.03.0663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Jumlah check dam yang dibangun	0
131	01.03.0666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki	0
132	01.03.0667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0
133	01.03.0668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0
134	01.03.0676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang ditingkatkan	0
135	01.03.0679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan	1
136	01.03.0683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	4,30
137	01.03.0686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	77
138	01.03.0689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	17
139	01.03.0693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	2
140	01.03.0694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	2
141	01.03.0709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0
142	01.03.0710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0
143	01.03.0715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	2.1
144	01.03.0716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	2
145	01.03.0721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	2607,1
146	01.03.0722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	145
147	01.03.0727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	6
148	01.03.0728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	Jumlah alokasi air di Daerah irigasi yang diberikan	179672

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
149	01.03.0729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	1
150	01.03.0730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang difasilitasi	708
151	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan b. meminta c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang d. memasuki tempat atau lokasi e. f. membuat rekaman audio g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana h. menghentikan pelanggaran dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.	0
152	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen		1
153	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen		1
154	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		0
155	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen		1
156	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen		0
157	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan		0
158	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan		0
159	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan		3
160	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		2
161	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
162	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		10
163	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		2
164	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		2
165	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen		1
166	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta		0
167	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		2
168	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	11
169	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	0
170	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	0
171	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
172	1.03.910193	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan di awasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten /Kota	Berapa banyak Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi dalam pemngembangan dan pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS meliputi: a. bantuan teknis dan non teknis penyiapan regulasi dan kebijakan turunan (NSPK) b. bantuan teknis dan non teknis untuk penyiapan perencanaan c. koordinasi penyelenggaraan dalam pembinaan dan pengawasan persampahan d. diseminasi peraturan daerah dan turunannya di bidang penyelenggaran persampahan e. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota terkait pengelolaan persampahan f. pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan g. pendataan kinerja fasilitas pengolahan sampah baik dalam SIPSN maupun platform lainnya	0
173	1.03.910194	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	TPA	Berapa banyak TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi meliputi: a. Operasional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS b. Operator atau penyelenggara di setiap fasilitas pengelolaan persampahan	0
174	1.03.910198	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0
175	1.03.910199	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0
176	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	0
177	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
178	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0
179	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang		0
180	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/U KL/UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan permukiman dan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
181	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)	0
182	1.03.910218	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	SK Cagar Budaya: pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya. (UU Nomor 11 Tahun 2010)	0
183	1.03.910219	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata. (UU Nomor 10 Tahun 2009)	1
184	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
185	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m ²) massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0
186	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0
187	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	1
188	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	15
2	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	0
3	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	0
4	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	0
5	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang berkomitmen menerima bantuan	210
6	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	210
7	1.04.000012	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0
8	1.04.000013	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
9	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana provinsi.	35
10	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana provinsi.	175
11	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana provinsi.	253
12	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	2
13	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
14	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
15	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	3
16	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb)	0
17	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit	0
18	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit	0
19	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit	0
20	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit	0
21	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
22	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit	0
23	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	10
24	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	0
25	1.04.000062	Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	0
26	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
27	1.04.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	I. Dinas Provinsi yang mengurus perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Dinas Provinsi yang mengurus perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kabupaten yang mengurus perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Provinsi yang mengurus perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun. III. Dinas Provinsi yang mengurus perumahan/permukiman	1
28	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan meliputi: a. hak keperdataan masyarakat terdampak, b. kondisi ekologis lokasi, dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	0
30	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi.	0
31	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	1
32	1.04.000077	Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	0
33	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
34	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0
35	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan: 1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan 2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan 3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	0
36	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani	0
37	1.04.000086	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
38	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	3
39	1.04.000091	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan: 1. Jumlah penerima bantuan 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Kesepakatan koordinasi	3
40	1.04.000093	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rebug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Laporan	(musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi yang memuat: 1. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 2. Identifikasi tingkat kerusakan rumah 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	31
41	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan	7
42	1.04.000096	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	0
43	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
44	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	1
45	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. Penanganan kumuh dilakukan pada kawasan kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha baik yang berada di lintas kabupaten/kota ataupun dalam satu kabupaten/kota dan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (2) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), serta (3) Revitalisasi rumah susun, dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	0
46	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
47	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	0
48	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman, dengan penjelasan daftar lokasi permukiman tsb.	2
49	1.04.000117	Lokasi Rawan Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
50	1.04.000118	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik BUMD yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan	0
51	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal	0.2615
52	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.	258,09
53	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	120
54	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana	253

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
55	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	260
56	1.04.000148	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	0
57	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Permukiman	0
58	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	35
59	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa total jumlah unit rumah yang akan ditangani	150
60	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang belum tertangani	15
61	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan, berapa unit rumah yang sudah ditangani	175
62	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	175
63	1.04.000178	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.	0
64	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
65	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi	852
66	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi	8464
67	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.	35
68	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	175
69	1.04.000205	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman	Dokumen	Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya.	0
70	1.04.000213	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	250
71	1.04.000214	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	22
72	1.04.000215	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	75

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
73	1.04.000220	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	153
74	1.04.000230	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen	I. Gubernur menetapkan/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah II. Kepala Dinas Provinsi yang mengurus perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dari Kepala Dinas yang mengurus perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang meliputi antara lain: A. Dokumen Permohonan Sertifikasi: 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 2. Data Identitas Pengembang Perumahan: a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan b. Tahun Pendirian c.	0
75	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0
76	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
77	1.04.000247	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Provinsi, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0
78	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh sesuai kewenangan	0
79	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0
80	1.04.000266	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi permukiman. Jenis prasarana antara lain: jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), sistem penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran	4
81	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi	0
82	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0
83	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	0
84	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
85	1.04.000283	Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangannya yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Pengadaan lahan termasuk pematangan lahan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, (3) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta relokasi/pemukiman kembali, (4) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), dalam rangka Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	0
86	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Peremajaan dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Pola penanganan ini dilakukan pada kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal. Digunakan untuk mengakomodir layanan sbb: (1) Penyediaan kompensasi bagi non-peserta peremajaan, (2) Biaya pembongkaran bangunan eksisting, dan (3) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) dalam rangka Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	0
87	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
88	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi	1
89	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	Laporan kegiatan sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat terdiri dari: 1. KAK/TOR kegiatan 2. RAB kegiatan 3. Hasil pelaksanaan kegiatan 4. Dokumentasi kegiatan	0
90	1.04.000300	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	0
91	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pembagian Rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0
92	1.04.000304	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi yang memuat: 1. Penjelasan program provinsi yang berdampak pada relokasi rumah 2. Jumlah unit rumah dan rumah tangga yang terdampak 3. Identifikasi masyarakat terdampak yang memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang tidak memiliki bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan 4. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	10

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
93	1.04.000306	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru 3. Siteplan, DED, dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	10
94	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	140
95	1.04.000319	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	Jumlah rumah yang dibangun bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria PLH	253
96	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen		35
97	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen		35
98	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah		0
99	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki "Lack of Access" terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga		0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	1.05.000002	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
2	1.05.000003	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
3	1.05.000004	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	1.05.000005	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kebakaran terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serangkaian proses bimbingan terkait hal teknis dengan memperhatikan pemahaman dan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani peningkatan kapasitas SDM	0
5	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana untuk dukungan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan dan memberikan pelatihan pencegahan bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	91
6	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara Bersama ataupun mandiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana berpotensi menjadi urusan provinsi	35
7	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	1.05.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1
9	1.05.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1
10	1.05.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	1.05.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1
12	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1
13	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Data yang memuat pelaksanaan kerjasama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Data ini dapat disajikan dengan memuat jumlah pelaksanaan rapat pembahasan kerjasama, atau jumlah daerah/lembaga/mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama, atau jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1
15	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1
16	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
17	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1
18	1.05.000049	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1
19	1.05.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	1.05.000051	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani informasi dan pengolahan data	1
21	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas layanan Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana berupa laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan dukungan untuk kabupaten/kota (misal: prosedur dukungan sistem peringatan dini tsunami kabupaten/kota) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis)	1
22	1.05.000061	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran adalah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
23	1.05.000062	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran adalah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1
24	1.05.000067	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda, melalui proses Yustisi yang dilakukan oleh PPNS, melalui wadah Sekretariat PPNS	0
25	1.05.000068	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, yang disidangkan melalui Sidang di Tempat	0
26	1.05.000069	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda oleh PPNS, baik Acara Pemeriksaan Cepat maupun Acara Pemeriksaan Singkat	154
27	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	Merupakan dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi melalui penyusunan dokumen JITU PASNA dan dokumen R3P yang menjadi kewenangan provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
28	1.05.000078	Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
29	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Provinsi merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas provinsi dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan provinsi	1
30	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0
31	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
32	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tindakan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan terkait kebakaran, dan tindakan darurat non-kebakaran	0
33	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	154
34	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	152
35	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	190
36	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Gubernur	41
37	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1
38	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
39	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	sosialisasi perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	135
40	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	sosialisasi Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	135
41	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0
42	1.05.000195	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0
43	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menajdi kewenangan provinsi meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di tingkat provinsi	1
44	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana skala provinsi sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	35
45	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi aparatur provinsi dan kabupaten/kota untuk jenis bencana prioritas provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
46	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana yang dampak kejadiannya berpotensi menjadi urusan provinsi	35
47	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah orang/aparatur/personil yang tersedia untuk melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) untuk mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan kabupaten/kota dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana lintas kabupaten/kota	3000
48	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	Merupakan penyediaan alat pelindung diri bagi aparat dan petugas penanggulangan bencana tingkat provinsi	119
49	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana antar kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	200
50	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0
51	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan	1
52	1.05.000269	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	Kegiatan Diklat atau Bimtek dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	1000
53	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
54	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan dokumen hasil kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang menjadikan Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1
55	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan dan dalam pelaksanaannya PPNS dapat meminta bantuan POL PP maupun Kepolisian	365
56	1.05.000281	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras yang pemanfaatannya untuk Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti Penegakkan Perda	8
57	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0
58	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
59	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1
60	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0
61	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0
62	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
63	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	0
64	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	0
65	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	1
66	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	1
67	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	1
68	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	Laporan pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah yang memuat : 1. Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas 2. Capaian pemenuhan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	0
69	1.05.000295	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	10

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
70	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota	35
71	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	0
72	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
73	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
74	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
75	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
76	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0
77	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
78	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0
79	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analisis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analisis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
80	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0
81	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten /Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dalam rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
82	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1
83	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1
84	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	5
85	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang ditetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
86	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	4
87	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1
88	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).	0
89	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
90	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	35
91	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	35
92	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	0
93	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
94	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	0
95	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
96	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1
97	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0
98	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
99	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
100	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
101	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0
102	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0
103	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
104	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	1
105	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	1
106	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1
107	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapsas damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapsas damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
108	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0
109	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	0
110	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat di mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0
111	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan ketertiban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	7

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
112	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	77
113	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tindakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	92
114	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusakan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	18
115	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
116	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).	0
117	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitas pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	57
118	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	1
119	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	231

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN :1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia terlantar di dalam panti	Orang	Alat bantu yang diterima oleh lanjut usia terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	50
2	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	Alat bantu yang diterima oleh penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	50
3	1.06.000004	Anak terlantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas.	0
4	1.06.000005	Anak terlantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	0
5	1.06.000006	Anak terlantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	0
6	1.06.000010	Anak terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1100
7	1.06.000011	Anak terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi anak terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	1100
8	1.06.000012	Anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan pengasuhan berupa upaya pemenuhan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut	1100
9	1.06.000013	Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	1100
10	1.06.000014	Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1100

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1100
12	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti berupa wali yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak	328
13	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Anak telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanaan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	1100
14	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Anak terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1100
15	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	Anak yang mendapatkan fasilitasi pengangkatan anak berupa perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat	328
16	1.06.000027	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal	Orang	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau ianda/duda	328
17	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan kendaraan panti sosial gelandangan dan pengemis.	3
18	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	200
19	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	200

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	1.06.000035	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Kartu Identitas Anak	0
21	1.06.000036	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Akta Kelahiran	0
22	1.06.000037	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	0
23	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	200
24	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	200
25	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Gelandangan dan pengemis di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	200
26	1.06.000049	Gelandangan dan pengemis yang tmendapat Fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi gelandangan dan pengemis di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Surat Nikah	0
27	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	0
28	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	Orang	Jumlah instruktur yang memberikan bimbingan keterampilan dasar	280
29	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12764

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
30	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	Jumlah keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	328
31	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	Fasilitasi pengentasan fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	10000
32	1.06.000060	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar	15
33	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	19
34	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	15
35	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis	3
36	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
37	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1
38	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	300
39	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	300
40	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	300
41	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	300
42	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	300
43	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	300
44	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Lanjut usia telantar di dalam panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	1285
45	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi lanjut usia terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1285
46	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	1285

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
47	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1285
48	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1285
49	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1285
50	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	400
51	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Provinsi	1
52	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	10000
53	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	120

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
54	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	120
55	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial	120
56	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	&Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	120
57	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	120
58	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
59	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	165
60	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial gelandangan dan pengemis	44
61	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial lanjut usia telantar	248
62	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman, halaman, jaringan, dan kendaraan di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	294
63	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Pemeliharaan bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	54
64	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	Pelaksanaan pemulasaraan sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar di dalam panti	15
65	1.06.000114	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan	0
66	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1655
67	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	1655
68	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	1655

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
69	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	1655
70	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1655
71	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	1655
72	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1655
73	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal sampai ibu kota daerah kabupaten/kota	370
74	1.06.000141	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	0
75	1.06.000142	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Akta Kelahiran	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
76	1.06.000143	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Kartu Identitas Anak	0
77	1.06.000144	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah)	370
78	1.06.000145	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	370
79	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	&Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	370
80	1.06.000147	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat Pembuatan Surat Nikah	0
81	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS di dalam panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	370

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
82	1.06.000149	PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	370
83	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1
84	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial anak terlantar	165
85	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	44
86	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	248
87	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	294
88	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	54
89	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial anak terlantar	165
90	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan, dan/atau kendaraan yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	44
91	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan di panti sosial lanjut usia telantar	248
92	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	294

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
93	1.06.000160	Standar sarana prasarana Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	Standar bangunan/asrama, jalan/taman/halaman, jaringan dan/atau kendaraan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	54
94	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia	1
95	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	576
96	1.06.000163	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak berupa upaya pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan	39
97	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial anak terlantar	39
98	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial gelandangan dan pengemis	7
99	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial lanjut usia terlantar	40
100	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial penyandang disabilitas terlantar	26

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
101	1.06.000168	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Orang	Tenaga pelayanan (Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang tersedia di panti sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	12
102	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	85
103	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	1345

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	21908844
2	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan	Kasus	Perusahaan yang disidik merupakan perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1
3	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, jaminan sosial, perempuan, anak, penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pesawat uap, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, lingkungan kerja, kesehatan kerja, konstruksi bangunan, penyalur petir, listrik, hygiene perusahaan, instalasi pemadam kebakaran, kebebasan berserikat, kesejahteraan, hubungan kerja.	925
4	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja	21828
5	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	1965
6	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	36

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	0
8	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	316940
9	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	0
10	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	31
11	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan	5495

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.	822
13	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja seras perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	1
14	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjaanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	104911
15	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	13406
16	2.07.000096	PMI Purna	Orang	Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	80
17	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	55,47
18	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4598479

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
19	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	230
20	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota	35
21	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat provinsi	6
2	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	4
3	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provinsi	6
4	2.08.000016	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat provinsi	4
5	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	6
6	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat provinsi	9
7	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan provinsi	115

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	1
9	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah provinsi.	35
10	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	11
11	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan provinsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	25
12	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di provinsi sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	50

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarus-tamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	50
14	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan <u>Kebutuhan Spesifik</u>	Orang	Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan provinsi	70
15	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan <u>masvarakat</u>	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	40
16	2.08.000056	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat provinsi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	35
17	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	35
18	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi.	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
19	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	5
20	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	50
21	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajemen kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	2
22	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	40
23	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	4

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)	1
2	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	Data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3	1
3	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	Direktori Konsumsi pangan berisi data/informasi konsumsi pangan dan skor PPH wilayah disajikan antar tahun/time series	1
4	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	1
5	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1
6	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	1
7	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1
9	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1
10	2.09.000091	Jenis promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	1
11	2.09.000092	Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan koordinasi yang dihadiri oleh gubernur/wakil gubernur dan atau DPRD/OPD dalam rangka sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1
12	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung	1
13	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/mon ev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi	1
14	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	1
15	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, label dan gizi pangan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
16	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu label dan gizi pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023	1
17	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan edukasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat/masyarakat umum	1
18	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki	2
19	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	Jumlah izin edar PSAT PD untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	1
20	2.09.000111	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun	Dokumen	Jumlah izin rumah pengemasan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	1
21	2.09.000113	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat	10
22	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	1
23	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam rangka konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1
24	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	Jumlah pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	1
26	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	1
27	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi berisikan data terkait jumlah pengadaan, jumlah yang dikelola dan jumlah yang disalurkan berdasarkan hasil koordinasi	1
28	2.09.000126	Jumlah promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Banyaknya kegiatan sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal yang dilakukan selama satu tahun	1
29	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan	1
30	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki	5
31	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan	2
32	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	1
33	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi	1
34	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
35	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	1
36	2.09.000146	Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya jenis kegiatan sosialisasi konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilakukan kepada masyarakat umum	1
37	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Banyaknya kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (gubernur/wakil gubernur/DPRD/OPD) dan atau dilakukan kepada anak sekolah/mahasiswa/kelompok masyarakat	1
38	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Calon penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi di daerah kabupaten/kota rentan rawan pangan atau terdampak bencana	1
39	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analisis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	1
40	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	Sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan segar berupa sertifikasi prima, sertifikasi organik, dan sertifikasi produk sesuai SNI yang diterbitkan dalam 1 tahun	1
41	2.09.000156	Jumlah health certificate (HC) per tahun	Dokumen	Jumlah health certificate (HC) untuk Pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun	1
42	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	Dokumen	Jumlah SPPB-PSAT yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun termasuk jumlah surveilen yang dilakukan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
43	2.09.000158	Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.	1
44	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	0
45	2.09.000161	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	1
46	2.09.000162	Data Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	&Data hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a. analisis b. perkiraan ketersediaan c. perkiraan kebutuhan d. dinamika harga dan e. dampak Krisis Pangan.&	1
47	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah provinsi, yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	1
48	2.09.000164	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	data pengembangan sektor pangan daerah provinsi berbasis pada sumber daya pertanian lokal yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	1
49	2.09.000188	Data pelaku usaha pangan segar	Dokumen	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar	1
50	2.09.000210	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
51	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	1
52	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah	1
53	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	724
54	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu	0,30
55	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan	199
56	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah	124
57	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	1
58	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	1
59	2.09.000254	Data Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	&Data hasil analisis: 1) Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang memuat aspek: a) analisis risiko, b) perkiraan ketersediaan Pangan, c) perkiraan kebutuhan Pangan, d) dinamika harga Pangan, dan e) dampak Krisis serta 2) Kajian Cepat Potensi Krisis Pangan yang memuat aspek: a) goographical, b) kondisi wilayah, c) dampak langsung dan d) dampak tidak langsung&	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0
2	2.10.000005	Berita Acara koordinasi pemanfaatan tanah kosong	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pemanfaatan tanah kosong yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0
3	2.10.000010	Berita acara rapat koordinasi penataan akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penataan akses dalam rangka Reforma Agraria yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	2
4	2.10.000011	Bidang tanah yang didistribusi	Dokumen	Redistribusi tanah yang dilaksanakan melalui tahapan: 1. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan output notulensi 2. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah dengan output laporan 3. penetapan sebagai objek redistribusi tanah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah	0
5	2.10.000020	Data inventarisasi penggunaan tanah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	0
6	2.10.000025	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Dokumen	Data lokasi	0
7	2.10.000039	Dokumen fasilitasi penetapan zona nilai tanah	Dokumen	Laporan hasil failitasi penetapan zona nilai tanah	0
8	2.10.000048	Dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	Dokumen	Laporan hasil koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
9	2.10.000079	Penetapan Gubernur	Dokumen	Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 Hari sejak diterimanya DPPT. Pendelegasian dilakukan melalui penetapan gubernur	1
10	2.10.000087	SK Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria	Dokumen	Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur	1
11	2.10.000090	Surat persetujuan pemilik bidang tanah	Surat	Catatan resmi (rekomendasi) tentang persetujuan pemilik bidang tanah	0
12	2.10.000092	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0
13	2.10.000093	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	hasil rapat Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa dokumen data sengketa konflik dan perkara dalam 1 daerah provinsi	1
14	2.10.000094	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi berupa laporan pelaksanaan GTRA Provinsi	1
15	2.10.000095	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	hasil Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi berupa berita acara pengusulan TORA	0
16	2.10.000096	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara	Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota berupa Berita Acara. Berita Acara merupakan dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
17	2.10.000097	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3
18	2.10.000101	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara	Hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara koordinasi	0
19	2.10.000102	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa dokumen	0
20	2.10.000104	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	0
21	2.10.000107	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	0
22	2.10.000108	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa berita acara	0
23	2.10.000109	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan	hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi berupa laporan	0
24	2.10.000110	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi berupa Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	2.10.000113	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	3
26	2.10.000123	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi berupa Dokumen	0
27	2.10.000136	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen	3
28	2.10.000137	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan	3
29	2.10.000138	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen	1
30	2.10.000141	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	0
31	2.10.000147	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	0
32	2.10.000178	Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Hasil dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen pemberitahuan	5
33	2.10.000181	Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa dokumen hasil koordinasi	5

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
34	2.10.000182	Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Mengumumkan Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum berupa surat pengumuman	5
35	2.10.000183	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	Hasil dari Kegiatan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Dokumen Daftar Sementara Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	5
36	2.10.000185	Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan	Hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa Laporan Konsultasi Publik	5
37	2.10.000188	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	5
38	2.10.000190	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	Hasil Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda berupa dokumen	0
39	2.10.000191	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	5
40	2.10.000192	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB berupa Dokumen	0
41	2.10.000193	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Rencana Pengadaan Tanah	5

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
42	2.10.000194	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	Hasil pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat berupa Dokumen hasil survei dan pengukuran.	0
43	2.10.000196	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	Hasil Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah	5
44	2.10.000197	Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah berupa Dokumen Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	0
45	2.10.000200	Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN berupa Dokumen Kegiatan Koordinasi	5
46	2.10.000204	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	Hasil Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Penyelesaian	0
47	2.10.000205	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa Laporan Koordinasi	0
48	2.10.000207	Laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan	Hasil Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	3

DATAR STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0
2	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten /Kota	Tersedianya data daerah yang melakukan kerja sama dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional	2
3	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0
4	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	190
5	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	190
6	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	31
7	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi/ lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya	1
8	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	26
9	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	Tersedianya data terkait pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	1
10	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	190
12	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	85
13	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	72
14	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup lintas kabupaten/kota yang mendukung pemenuhan RPPLH	1
15	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku.	39
16	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	335
17	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	1
18	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	1
19	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan pelaporan pelaksanaan RPPLH Provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	1
21	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	1
22	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	188
23	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	22
24	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0
25	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	0
26	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	39
27	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	67
28	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah provinsi	0
29	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	39

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
30	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	Ton	1. Data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. Data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	0
31	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	1
32	2.11.000064	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	1
33	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	71
34	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan	1
35	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	8
36	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	1
37	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remediasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0
38	2.11.000082	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
39	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	1
40	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	1
41	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1
42	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
43	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0
44	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1
45	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2
46	2.11.000101	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
47	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga lain	1
48	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0
49	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71
50	2.11.000115	Lokasi Proklamasi yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	Data lokasi proklamasi di provinsi	240
51	2.11.000117	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	143,5
52	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	58345,63
53	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	400
54	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	268
55	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	268
56	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	52,03

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
57	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	78,67
58	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	69,46
59	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	48,37
60	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	87,73
61	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	144
62	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	22
63	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	237
64	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	237
65	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	237
66	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	6
67	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	6
68	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	12
69	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	31
70	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	1530

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
71	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Unit	1. Tersedianya data Jumlah TPA/TPST Regional 2. Tersedianya Kapasitas Operasional setiap TPA/TPST Regional 3. tersedianya data biaya operasional setiap TPA/TPST Regional per ton	0
72	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPI H	Usaha/Ke giatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	18
73	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	87
74	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	1530
75	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	85
76	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	335
77	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	0
78	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. Data jumlah kebijakan yang disusun 3. Data jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
79	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	1
80	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	22
81	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	39
82	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	0
83	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	39
84	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	0
85	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	35
86	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
87	2.11.000212	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0
88	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	3
89	2.11.000219	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	1
90	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1
91	2.11.000223	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0
92	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	1
93	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
94	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1. tersedianya data jumlah daerah 2. tersedianya data potensi timbulan sampah daerah 3. tersedianya data jumlah/prosentase sampah tidak terkelola di setiap daerah (kabupaten/kota)	1
95	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatkan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	1
96	2.11.000233	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	0
97	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	1
98	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	0
99	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	71
100	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	71

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
101	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71
102	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilitasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem	0
103	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	144
104	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	22
105	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	6
106	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	6
107	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	12
108	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	0
109	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	99
110	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	880

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
111	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Tersedianya data: a. pembuatan KLHS meliputi SK Tim, Pengkajian TPB, Perumusan Skenario, Penjaminan Kualitas. b. pelaksanaan KLHS meliputi integrasi ke dalam RAD TPB dan dokumen perencanaan RPJMD	35
112	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	69,46
113	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	1
114	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	1
115	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		Laporan hasil pembinaan terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan RPPLH dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dll	2
116	2.11.000293	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi		Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi	39
117	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	1
118	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
119	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	0
120	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	0
121	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
122	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	0
123	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi penintegrasian)	35
124	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
125	2.11.000309	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi penintegrasian)	35
126	2.11.000312	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	82
127	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
128	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
129	2.11.000315	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten /Kota	Data kabupaten/kota di suatu provinsi yang telah dilaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi (termasuk pelaksanaan bimtek, asistensi, supervisi, validasi hingga verifikasi	35
130	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0
131	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	12
132	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
133	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.	0
134	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0
135	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0
136	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0
137	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
138	2.11.000333	Laporan hasil telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan / Dokumen	Laporan yang berisi tentang telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota sebagai hasil dari pembinaan, penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh provinsi kepada Kabupaten/Kota	0
139	2.11.000334	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Data Laporan Induk/Catatan Hasil Asistensi KLHS Kab/Kota yang dilakukan pembinaan serta Berita Acara Verifikasi Integrasi	82
140	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah	0
141	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	2
142	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
143	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
144	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0
145	2.11.000340	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya	Laporan	Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
146	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0
147	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	12
148	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	0
149	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
150	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0
151	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	0
152	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.	0
153	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
154	2.11.000356	Data jumlah tonase sampah sungai/DAS provinsi yang ditangani	Ton	Data jumlah sampah sungai/DAS provinsi yang diangkut dan ditangani oleh provinsi	0
155	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	17369,37
156	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	6339820,22

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pada bidang pencatatan sipil.	1
2	2.12.000011	Dokumen hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam bidang administrasi kependudukan	0
3	2.12.000013	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	Dokumen	Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Adminduk sehingga perlu adanya pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat.	1
4	2.12.000014	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Adminduk sehingga perlu adanya pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
5	2.12.000015	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti puskesmas, sekolah, KUA, LSM dan lembaga lainnya untuk pencapaian target nasional dan daerah dalam bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0
6	2.12.000016	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Dukcapil Provinsi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti puskesmas, sekolah, KUA, LSM dan lembaga lainnya untuk pencapaian target nasional dan daerah dalam bidang Pencatatan sipil.	0,00E+00
7	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas Peristiwa Penting	Dokumen	Pemanfaatan data atas peristiwa penting adalah proses pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Masyarakat pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan Masyarakat, demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan, mencakup langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur permohonan data penting, memberikan layanan yang responsif dan efisien dalam pengolahan permohonan, serta memastikan keamanan dan privasi data atas peristiwa penting yang dimanfaatkan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan adalah proses pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna oleh Menteri Dalam Negeri. Hak akses ini diberikan untuk berbagai tujuan, di antaranya: Peningkatan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur. Data ini dihasilkan dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	0
9	2.12.000021	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan adalah proses pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Masyarakat pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, peningkatan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan, mencakup langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur permohonan data, memberikan layanan yang responsif dan efisien dalam pengolahan permohonan, serta memastikan keamanan dan privasi data yang dimanfaatkan.	0
10	2.12.000022	Dokumen hasil penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan adalah proses pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Masyarakat pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, peningkatan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan, mencakup langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur permohonan data, memberikan layanan yang responsif dan efisien dalam pengolahan permohonan, serta memastikan keamanan dan privasi data yang dimanfaatkan.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	2.12.000029	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen		0
12	2.12.000030	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk adalah prosedur dan sistem pemantauan yang memastikan bahwa suatu organisasi menjalankan fungsinya sesuai dengan standar dan kewajiban hukum pada bidang pendaftaran penduduk skala provinsi, sehingga tata kelola dapat tersistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen yang baik.	1
13	2.12.000031	Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil ditetapkan	Dokumen	Regulasi dan kebijakan-kebijakan terbaru secara teknis pada Bidang Pencatatan Sipil adalah dokumen kebijakan teknis untuk mengelola terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi sehingga menjadi selaras antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah	0
14	2.12.000036	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Dokumen		1
15	2.12.000038	Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen		1
16	2.12.000041	Dokumen Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Dokumen		0
17	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	Menyusun profil kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1
19	2.12.000048	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen		0
20	2.12.000049	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang	Dokumen		0
21	2.12.000054	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1
22	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1
23	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan		1
24	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	Laporan		1
25	2.12.000064	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan		1
26	2.12.000065	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
27	2.12.000066	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1
28	2.12.000070	Laporan hasil koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1
29	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1
30	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan		1
31	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan		1
32	2.12.000083	Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan		1
33	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan		1
34	2.12.000093	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang		35
35	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	1
36	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota	17

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
37	2.12.000101	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan	Orang	Bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas lainnya bagi aparatur Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota	35

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan	0
2	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.	6695

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
3	2.13.000011	Desa yang melakukan pengembangan Inovasi	Desa	Kegiatan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, meliputi : I. Fasilitasi Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 1) Penyusunan Strategi Pengembangan Desa Berprestasi/Inovatif berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa 2) Pengembangan Kapasitas Evaluator pelaksanaan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 3) Penyusunan Juknis penjaringan Desa/Kelurahan Berprestasi 4) Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi (Lomba Desa) II. Fasilitasi Program Pasca Penjaringan Desa Berprestasi (Lomba Desa) 1) Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2) Labsite / Laboratorium Desa Percontohan 3) Peningkatan Kapasitas bagi Desa Kurang Berkembang 4) Evaluasi pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Desa 5) Publikasi Sukses Story Desa Berprestasi/Inovatif	0
4	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, perlindungan, dan pemasaran.	9
5	2.13.000022	Dokumen hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
6	2.13.000026	Dokumen penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen	Sistem Informasi Kampung atau Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.	7810 desa
7	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	Orang		150
8	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa	0
9	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya atau dukungan (pelaksanaan program/kegiatan, bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Penggerak PKK sebagai mitra Pemerintah di setiap jenjangnya dalam rangka menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui 10 Program Pokok PKK 2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
10	2.13.000032	Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Laporan		0
11	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b. lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.	1
12	2.13.000036	Laporan hasil pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan keberhasilan & inovasi yg telah dilakukan oleh Pemda serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. kegiatan pada pelaksanaan Pindeskel meliputi: 1. Penyusunan Juklak Pindeskel 2. Peningkatan kapasitas pemerintah Desa 3. Pelaksanaan pameran Inovasi Desa 4. Evaluasi Pindeskel	0
13	2.13.000037	Laporan hasil penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan		1
14	2.13.000038	Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan		0
15	2.13.000039	Laporan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
16	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan	Gelar TTG adalah salah satu metode pemasyarakatan TTG yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Gelar TTG dilakukan melalui kegiatan: a. pameran b. lokakarya c. temu inventor/inovator TTG dan/atau d. forum komunikasi e. widyawisata f. dan g. festival/pameran potensi desa.	1
17	2.13.000041	Laporan penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan		1
18	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan adalah dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengawasan desa adalah untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu: a. kepala b. perangkat c. kelompok kerja Pendataan d. tim penyusun RPJM e. tim penyusunan RKP f. panitia pengadaan barang dan jasa di dan g. tim Pelaksana Kegiatan Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.	0
19	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa	130

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi	0
21	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, perlindungan, dan pemasaran.	9
22	2.13.000063	Penyelenggaraan musyawarah desa	Dokumen	Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
23	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	0
24	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	Dokumen		0
25	2.13.000068	Pranata hukum adat	Dokumen	Pendataan SK MHA	0
26	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	35
27	2.13.000070	Sanggar PKK di Kampung	Unit		35
28	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan	0
30	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.	7810
31	2.13.000076	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.14.000004	Daerah Penerima Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga kepada Kab/Kota	1
2	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	27
3	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	1
4	2.14.000009	Daerah yang telah Menyeraskan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (iBangga)	Dokumen	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	27
5	2.14.000010	Daerah/Instansi/Stake holder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja yang dilaksanakan oleh Daerah	4
6	2.14.000011	Daerah/Instansi/Stake holders yang telah menerima Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sertifikat	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi fasilitasi kegiatan inovasi	1
7	2.14.000012	Daerah/Instansi/Stake holders yang telah menerima Pembinaan terkait Kespro	Sertifikat	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan	1
8	2.14.000020	Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	Kegiatan	Lintas sektor yang memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3
9	2.14.000021	Dokumen Hasil Pemetaan KKBPK (Bangga Kencana)	Laporan	Melaksanakan Pemetaan Program Bangga Kencana	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
10	2.14.000023	Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Bangsa Kencana yang telah diserasikan	Dokumen	Daerah menyeraskan kebijakan-kebijakan yang ada terhadap Bangsa Kencana	2
11	2.14.000027	Dokumen Profil KKBPK (Bangga Kencana)	Dokumen	Menyusun Profil Bangsa Kencana	2
12	2.14.000031	Generasi Berencana (Genre) yang telah menerima Sosialisasi dan Pembinaan	Sertifikat	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana yang dilakukan oleh Daerah	0
13	2.14.000032	Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Program Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	9
14	2.14.000033	IPBK (iBangga) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang telah dilaksanakan survey	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	35
15	2.14.000039	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga	Kampung KB	Daerah Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	1766
16	2.14.000046	Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Instansi	Daerah yang bekerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	9
17	2.14.000055	Materi dan Sarana Promosi, KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang telah memiliki Materi Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1
18	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
19	2.14.000060	Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1
20	2.14.000062	Mitra dan Organisasi Masyarakat yang telah menerima fasilitasi peningkatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	13
21	2.14.000076	Organisasi yang telah mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	6
22	2.14.000079	Organisasi yang telah Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	Daerah yang mengembangkan dan menguatkan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	6
23	2.14.000080	Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	Organisasi	Daerah yang mengembangkan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	2.14.000082	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain	2
25	2.14.000083	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Jalur Nonformal dan Informal (Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat)	4
26	2.14.000084	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk kepada Pemangku Kepentingan	1
27	2.14.000085	Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Kegiatan	Daerah (Provinsi) Melaksanakan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA), Nonformal dan Informal	4
28	2.14.000093	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	2.14.000096	Penyediaan & Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	4
30	2.14.000097	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	4
31	2.14.000098	Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	Sertifikat	Daerah Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	0
32	2.14.000099	Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga yang telah mendapat dukungan	Kegiatan	Daerah (Provinsi) Melakukan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (baik hasil pelayanan KB, pengendalian lapangan dan pendataan keluarga beserta pemutakhirannya)	1
33	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyak Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya	1
34	2.14.000102	PIK-R yang telah menerima/mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kelompok di Kampung KB	Organisasi	Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB yang mendapat fasilitasi	3
35	2.14.000103	PIK-R yang telah mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana	Organisasi	Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pelatihan/Orientasi /Workshop	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
36	2.14.000106	Prototype Materi Pembangunan Keluarga yang telah dikembangkan Sesuai dengan Kearifan Lokal	Unit	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	3
37	2.14.000114	Strategi Operasional Advokasi, Promosi yang telah Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	Daerah yang telah menetapkan Strategi Advokasi, Promosi dan KIE yang dikembangkan sesuai Kearifan Lokal	1
38	2.14.000115	Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kespro yang telah Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Daerah mengembangkan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyanggah disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan	23443
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	6
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan	0
5	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur penghentian darurat.	41
6	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	37

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	28
8	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal	1
9	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 5 (lima) b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dan c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.	25
10	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	Unit	Fasilitas pokok antara lain berupa: a. b. gudang lini c. lapangan penumpukan lini d. Terminal e. Terminal peti f. Terminal curah g. Terminal curah h. Terminal ro- i. car j. Terminal k. fasilitas penampungan dan pengelolaan l. fasilitas m. fasilitas pemadam n. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu dan p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi Fasilitas penunjang berupa: a. kawasan b. fasilitas pos dan c. fasilitas pariwisata dan d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu kendaraan i. kawasan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Unit	Fasilitas pokok meliputi: a. b. lapangan c. terminal d. fasilitas penampungan dan pengolahan e. fasilitas f. fasilitas pemadam dan g. fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3). Selain fasilitas pokok rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan: a. penimbangan kendaraan bermuatan untuk angkutan b. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way); c. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa Pelabuhan, termasuk fasilitas untuk kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan di d. instalasi air bersih, listrik, dan e. akses jalan dan/atau jalur kereta dan f. tempat tunggu atau lapangan parkir kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Fasilitas penunjang meliputi: a. b. fasilitas pos dan c. fasilitas d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu	0
12	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima)	25

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima)	5
14	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi	8
15	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
16	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	0
17	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelayakan kapal serta diawasi oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T	53

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	0
19	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C.	12175
20	2.15.000048	Data auditor LLAJ Provinsi	Dokumen	(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan b. gubernur, untuk jalan dan c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
21	2.15.000053	Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dokumen Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada: a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	1
22	2.15.000058	Data dokumen perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh Izin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredging</i>) dari lokasi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
23	2.15.000062	Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dokumen Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada: a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	1
24	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyanggah disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum	23
25	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	23
26	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	23

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
27	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenalan dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal	36
28	2.15.000076	Data Inspektur LLAJ provinsi	Dokumen	1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan b. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan c. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku d. kartu pengawasan yang masih berlaku 3. unsur teknis meliputi: a. unsur teknis utama b. unsur teknis penunjang 4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan: - antarkota - antarkota antarprovinsi - antarkota dalam dan - antarkota dalam kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - menghubungkan beberapa stasiun - tidak menyediakan layanan penumpang - melayani penumpang tidak - memiliki jarak dan atau waktu tempuh e. memiliki frekuensi keretaapi sedang atau dan f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota&	12
30	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
31	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk	324379
32	2.15.000091	Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	0
33	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
34	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan: a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam dan b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen b. dokumen c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab d. jenis e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan f. tanda identitas Perusahaan Angkutan dan g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor b. fisik Kendaraan Bermotor dan c. Standar Pelayanan Minimal.	5
35	2.15.000096	Data Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pekerjaan pengerukan harus mendapat izin dari: a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. Untuk memperoleh Izin pengerukan, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi: 1. akte pendirian 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili dan 4. keterangan penanggungjawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan 3. peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredaesounding</i>) dari lokasi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
36	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	0
37	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi dilakukan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi	0
38	2.15.000104	Data Laporan perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban: a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian c. memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang e. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar dan f. melaksanakan kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
39	2.15.000107	Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	0
40	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan pelayanan	1
41	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	0
42	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	0
43	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	0
44	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita pengaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	21092
45	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
46	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	Dokumen	Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja	0
47	2.15.000154	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	0
48	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	0
49	2.15.000157	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
50	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiap Terminal Tipe B	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	111
51	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	23
52	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	23
53	2.15.000177	Data Terminal yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	11

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
54	2.15.000182	Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
55	2.15.000185	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
56	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	6
57	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	33

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
58	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas	33
59	2.15.000198	Izin Lingkungan sesuai denganketentuan perundang-undangan	Dokumen		0
60	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.	0
61	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	Kebutuhan angkutan (demand) meliputi: 1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau. 2. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan angkutan penumpang, angkutan kendaraan R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) di Pelabuhan Sungai dan Danau.	0
62	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta memiliki Trayek Tetap dan Teratur dan/atau Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sesuai PM 61 Tahun 2021.	0
63	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	20564

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
64	2.15.000211	Marka Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang ter rehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan	0
65	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	191
66	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	0
67	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan penunjang mobilitas penduduk di wilayah tersebut.	0
68	2.15.000229	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
69	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan yang ditetapkan dengan KP 432 Tahun 2017	5
70	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	3
71	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	7
72	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	RAK LLAJ Provinsi , memuat: a. sasaran Pemerintah b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian / c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah d. Rencana aksi dan target dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Provinsi , disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
73	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), merupakan wilayah daratan dan / atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), terdiri atas: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas b. kawasan kemungkinan bahaya c. kawasan di bawah permukaan d. kawasan di bawah permukaan horizontal- e. kawasan di bawah permukaan dan f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar	6
74	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.	23443

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
75	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	15
76	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian paling sedikit: 1. Pengemudiorang. 2. Pengemudi cadangan orang. 3. Kondektur.... orang. 4. Pembantu pengemudi orang. 5. Mekanik....orang.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
77	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyanggah cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	0
78	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun	151
79	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenalan dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	0
80	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	23
81	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman	146
82	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
83	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan	1
84	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1
85	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	Jumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang	791261
86	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.	18164645
87	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4. dan 5. asal dan tujuan pelayanan trayek.	0
88	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	46
89	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri	0
90	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	Persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
91	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	111
92	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya	25
93	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	32
94	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	382
95	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
96	2.15.000331	Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	0
97	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	32
98	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
99	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya	5
100	2.15.000345	Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Regulasi	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1
101	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	1
102	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang	10
103	2.15.000352	Data badan usaha yang telah memperoleh izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan dan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi. Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan. Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dapat mencakup kegiatan penyewaan	599

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
104	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
105	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0
106	2.15.000370	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pengumpan regional dan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Pelabuhan, serta Dokumen (P3D) administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.	0
107	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
108	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keputusan penetapan trayek/lintas merupakan salah satu syarat administrasi permohonan pembangunan pelabuhan	5
109	2.15.000377	Data jumlah izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan	Unit	Fasilitas Pelabuhan terdiri Jenis, Jumlah dan Kondisi dari Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya	1
110	2.15.000378	Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Unit Penyelenggaraan Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0
111	2.15.000379	Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	Pengawasan sebagaimana meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.	11
112	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
113	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar	0
114	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen	Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antarpulau dan antarprovinsi, serta keterkaitan antarkawasan kabupaten / kota.	0
115	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. b. c. pengamatan (Surveillance); d. pemantauan (Monitoring); dan/atau e. pengujian (test).	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
116	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian	Laporan	Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian	0
117	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	25
118	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	10
119	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	Alat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera memperlambat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.	0
120	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	Bangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.	3
121	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	4
122	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati-hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	24

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
123	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.	8
124	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatnkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatnkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	434
125	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	0
126	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	4

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	1
2	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	59
3	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1
5	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	1
6	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	1
8	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.	1
9	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	1
10	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	1
11	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi -Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	49

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	2.16.000084	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten /kota	-Perhitungan Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah melalui tahapan : a.Pemerintah Daerah mengajukan pertimbangan kelaikan operasi kepada Menteri dan mengajukan pertimbangan kelaikan keamanan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan b.pengajuan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui portal resmi yang diselenggarakan oleh Menteri dengan melampirkan surat permohonan pertimbangan kelaikan operasi dan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala c.Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan evaluasi mandiri atas jaringan intra Pemerintah Daerah yang dikelolanya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh d.Menteri melakukan penilaian kelaikan operasi	35
13	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi	20

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	25
15	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	2
16	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwidth adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	1300
17	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	49

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.	49
19	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	76
20	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	192
21	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
22	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	0
23	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	15
24	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	75

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	1
26	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	33
27	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	70
28	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	1
29	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	1
30	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	29
31	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	574
32	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	220
33	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	230

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
34	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	10294
35	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	7
36	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]	240
37	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	0
38	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang dimaksud adalah laporan kasus	6
39	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangkapan kamera	988

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
40	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	975
41	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	60
42	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan	125
43	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	1200
44	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi	29
45	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	11
46	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	470
47	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain -Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	6
48	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dll	900

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
49	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	700
50	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka	4449708
51	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	2
52	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di seluruh Perangkat Daerah Pemda	740
53	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat - Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa	975
54	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	603
55	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	52
56	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	49

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
57	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	8
58	2.16.000156	Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Unit	- Perhitungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah - Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	1
59	2.16.000157	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	kabupaten /kota	-Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan Sosialisasi program Provinsi Cerdas -Sosialisasi program Provinsi Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan provinsi cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah kota/kabupaten yang berada pada wilayah provinsi .	35
60	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen	50

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	4
2	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	15
3	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	11
4	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	0
5	2.17.000011	Koperasi usaha simpan pinjam	Unit Usaha	Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.	634

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
6	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	47
7	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	348
8	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	348
9	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	30
10	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jati diri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	50
11	2.17.000017	Koperasi Yang Diberikan penilaian manajemen	Unit Usaha	Penilaian Manajemen adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	80
12	2.17.000018	Koperasi Yang Diberikan penilaian permodalan	Unit Usaha	Penilaian Permodalan adalah salah satu aspek penilaian kesehatan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performanya.	0
13	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro.	390

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	390
15	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.	545

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
16	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	660
17	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	4
18	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	500
19	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	124
20	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	429

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
21	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	124
22	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	4
23	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	390
24	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif, bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	306
25	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	24

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	45
2	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	112
3	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	52077
4	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	653
5	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	7622

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
6	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	653
7	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	653
8	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	83
9	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	2919
10	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	406057
11	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	0
12	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	&Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal &	0
14	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0
15	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0
16	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	0
17	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	&Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan&	0
18	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	0
19	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi .	Dokumen	Peta Potensi Investasi Provinsi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Provinsi yang mempunyai nilai ekonomi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	32
21	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	312
22	2.18.000033	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0
23	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	53550
24	2.18.000035	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	0
25	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
26	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	1
27	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0
28	2.18.000039	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	0
29	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	0
30	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	6
31	2.18.000044	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN

:2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	4000
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	200
3	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	Wirausaha muda usia 16-30 tahun yang memiliki Nomor Induk NIB untuk difasilitasi agar terafiliasi dengan dunia usaha	120
4	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	0
5	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	3
6	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	0
7	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	0
8	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	0
9	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	195
10	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahragawan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	1150

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	1
12	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	0
13	2.19.000079	kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga / Pekan olahraga Daerah pada berbagai cabang olahraga (PORDA)	0
14	2.19.000080	kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan paralimpik di tingkat provinsi (PERPARPROV)	1
15	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	0
16	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	0
17	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	
18	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	2
19	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1
20	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	14
21	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0
22	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	1
23	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	0
25	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	8
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	8
3	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	25
4	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	90
5	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	0
6	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	100
7	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	7
9	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	1
10	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	20
11	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	7
12	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data mengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	59,32
13	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen.	37,5

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	2
15	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	25
16	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	36
17	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	9
18	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2
3	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1
4	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	46
5	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0
6	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Provinsi	1
7	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50
8	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	50

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.22.000001	Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen	- Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. - Media Luar ruangan : Media Luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya.	1
2	2.22.000040	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	2172
3	2.22.000084	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	- Sumber daya manusia (SDM) : Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kelembagaan Desa/Desa Adat : kelembagaan desa/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.	150

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	2.22.000132	Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan	Objek	Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya	0
5	2.22.000154	Penulisan Sejarah Lokal Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	- Penulisan Sejarah : Penulisan Sejarah adalah penulisan fakta-fakta dan interpretasi sejarah yang telah disimpulkan. - Dokumen : dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Sejarah Lokal : Sejarah Lokal adalah sejarah dari suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah. Batasan geografis pengkajian sejarah lokal mencakup tempat tinggal suku bangsa yang mungkin terdiri dari dua atau tiga daerah administratif atau bahkan lingkup pengkajiannya hanya pada sebuah kota bahkan desa.	3
6	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	2.22.000195	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan	Orang	- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN

: 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi yang berada di wilayah provinsi	36
2	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain yang berada di wilayah provinsi	27
3	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	117
4	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	36
5	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah menengah sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan yang berada di wilayah Provinsi	1999
6	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (pasal 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi.	68

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Rata-Rata kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum per hari di wilayah provinsi baik secara onsite maupun online	12218
8	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Rata-rata kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	0
9	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) per hari di perpustakaan sekolah menengah (SMA/ sederajat) di wilayah Provinsi baik secara onsite maupun online	18584
10	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	rata-rata kunjungan civitas sekolah (siswa, guru , tenaga pendidikan) perhari di perpustakaan satuan pendidikan khusus baik secara online maupun secara onsite	0
11	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan umum yang berada di wilayah Provinsi	197077
12	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan khusus yang berada di wilayah Provinsi	20426
13	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Sekolah Menengah (SMA/SMK sederajat) di wilayah Provinsi	1049716

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi	16525
15	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan di wilayah provinsi	5678
16	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/pr odusen	Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang berada di wilayah Propinsi	184
17	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	Kegiatan pengolahan meliputi verifikasi, entry data (deskripsi Bibliografis, nomor klasifikasi, subjek, abstrak), upload cover, memasang RFID, tagging dan label. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi hasil serah simpan KCKR di wilayah provinsi yang sudah diolah	3000

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	Entry	Katalog Induk Daerah (KID) merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan daerah tertentu di wilayah Provinsi yang diinventarisasi dan didayagunakan sebagai alat silang layan melalui jaringan perpustakaan. Katalog Induk Daerah berfungsi untuk meningkatkan jaringan kerjasama katalog antar perpustakaan yang ada di wilayah provinsi tersebut Literatur sekunder merupakan terbitan yang dapat membantu pemustaka untuk mengetahui informasi tentang koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan secara lebih mudah sehingga pemustaka dapat menemukan bahan perpustakaan yang diperlukan secara cepat. Literatur sekunder merupakan suatu alat temu kembali informasi bagi pemustaka. Kegiatannya mengumpulkan semua data bibliografis koleksi setiap perpustakaan dan diidentifikasi ketersediaan judul yang sama dengan memberikan kode lokasi perpustakaan. Melalui kode lokasi ini	2341
19	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	naskah	Bibliografi Daerah berfungsi untuk menginventarisasi terbitan terbaru di suatu wilayah (Provinsi). Bibliografi Daerah juga sebagai alat pengawasan bibliografi. Data bibliografi terbitan dan publikasi di wilayah Provinsi meliputi terbitan Buku, media cetak terbitan berseri, bahan kartografi, rekaman suara analog, rekaman video analog, Buku elektronik, media terbitan berseri elektronik, bahan kartografi elektronik, hasil penelitian elektronik dengan periode terbit tahunan, musik digital, film digital, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di wilayah provinsi tersebut. Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah terbitan bibliografi daerah pada kurun waktu periode satu tahun	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
20	2.23.000073	Pelestarian naskah kuno milik Provinsi	naskah	Naskah kuno semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah naskah kuno milik provinsi yang dilestarikan	7
21	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan	374
22	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegiatan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Provinsi	6
23	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	210

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	88
25	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK sederajat) di wilayah Provinsi (tidak termasuk pustakawan)	528
26	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi (tidak termasuk pustakawan)	846
27	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah provinsi	305
28	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah provinsi	15
30	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan satuan pendidikan Khusus di wilayah provinsi	0
31	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah provinsi	346451
32	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah provinsi	1135
33	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan menengah (SMA /SMK/Sederajat) yang berada di wilayah provinsi	116542
34	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan pendidikan khusus yang berada di wilayah provinsi	228
35	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Satuan pendidikan membina kebudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. Jumlah Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	186

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
36	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	233
37	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi (duta baca/bunda baca,dll.) diwilayah Provinsi	20
38	2.23.000093	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	1120
39	2.23.000094	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan Jumlah perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional	1154

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, - Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi - Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksesibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	16102
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	400
3	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	12260

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
4	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubernur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	12260
5	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia	10019
6	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	1219
7	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	1219

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.	3861
9	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	7961
10	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsip vital, terjaga, alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	97627
11	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	154

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN :3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.	1
2	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	1
3	3.25.000062	Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dokumen yang disusun untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	3
4	3.25.000086	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Pemasaran oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0
5	3.25.000087	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah di Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	141
6	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0
7	3.25.000099	Kapal perikanan yang diawasi dalam Kegiatan penangkapan ikan	Unit	Data kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	1072

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	0
9	3.25.000108	Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penambahan ilmu dan pengetahuan melalui pendampingan, teknologi informasi dan penyelenggaraan pelatihan	40
10	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau&	0
11	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel	2
12	3.25.000128	Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang dicadangkan	13285,97

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	3.25.000129	Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan	Ha	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola merupakan Jumlah besaran area pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan	123480,86
14	3.25.000130	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi	Ha	Luasan Area Penggunaan Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	6,58
15	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	Jumlah masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil	0
16	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	1
17	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Orang	Jumlah pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	0
18	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Polisi Khusus Wilayah Pesisir Pulau - Pulau Kecil (Polsus PWP3K)	4
19	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.	1
20	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan.	410811,29

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
21	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (10 GT Sampai dengan 30 GT)	1
22	3.25.000196	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi (Sampai dengan 10 GT)	1
23	3.25.000198	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	1
24	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sampai dengan 10 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	1
25	3.25.000203	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah banyaknya dokumen terkait prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis yang dikeluarkan untuk Izin melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang mencakup di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
26	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1,25
27	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi	7
28	3.25.000230	speedboat pengawas	Unit	Jumlah speedboat pengawasan yang dimiliki	3
29	3.25.000260	Wadah Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	&Wadah dan segala bentuk bangunan, jalan produksi, saluran irigasi, dan sejenisnya yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya berdasarkan potensi dan tercantum dalam RTRW: - data luas potensi lahan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas lahan existing pemanfaatan budidaya air payau / tambak (ha) - data luas potensi lahan budidaya air tawar (ha)&	40695,80
30	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	Jumlah Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	11

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
31	3.25.000262	Unit penangkapan ikan	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	35,33
32	3.25.000263	Kapal di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	&Jumlah kapal penangkap ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi&	1,07
33	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan Penumbuhan Pokmaswas dilakukan atas prakarsa masyarakat sendiri sedangkan pengembangan Pokmaswas dapat difasilitasi oleh Pemda. Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pusat	85
34	3.25.000269	Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	Unit	&Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah&	3
35	3.25.000270	Unit kapal yang aktif (Memiliki Izin yang masih berlaku)	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan yang memiliki izin yang masih aktif sesuai dengan kewenangan Provinsi	35,33
36	3.25.000271	Pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder) yang memiliki kapal penangkap ikan yang masih aktif	477

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
37	3.25.000272	Permohonan lokasi pengembangan pelabuhan perikanan yang disertai dengan Detail Engineering Designed (DED)	Dokumen	Jumlah surat permohonan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
38	3.25.000273	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang ditolak	0
39	3.25.000274	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut&	208
40	3.25.000275	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan&	125
41	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton	Jumlah penggunaan pakan ikan untuk pembudidayaan ikan di laut	10,98
42	3.25.000277	Produksi benih Ikan Laut	Ekor	Produksi benih ikan laut hasil budidaya	50088701
43	3.25.000278	Jumlah produksi bibit rumput Laut	Ton	Jumlah produksi bibit rumput laut	0
44	3.25.000282	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
45	3.25.000283	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
46	3.25.000284	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	0
47	3.25.000285	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
48	3.25.000286	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses	Dokumen	&Jumlah Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan&	0
49	3.25.000287	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	0
50	3.25.000291	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
51	3.25.000292	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses	Dokumen	Jumlah Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses ke OPD bidang kelautan dan perikanan	0
52	3.25.000293	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
53	3.25.000296	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang ditolak	0
54	3.25.000297	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses lebih lanjut	208
55	3.25.000298	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diproses dengan catatan	0
56	3.25.000299	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	407
57	3.25.000300	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	407
58	3.25.000301	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	407
59	3.25.000303	Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Perkara	Jumlah Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	9

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
60	3.25.000304	Peta rawan pelanggaran usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	Peta Rawan pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	1
61	3.25.000305	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan	Program/Kegiatan	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui APBD	1
62	3.25.000306	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis perizinan berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	1
63	3.25.000310	Pelabuhan di Wilayah Perairan Darat	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi di wilayah perairan darat	0
64	3.25.000311	Jumlah dan jenis alat tangkap di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan dan/atau jenis alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di wilayah perairan darat yang sesuai dengan izin dan peruntukannya	42,271
65	3.25.000312	Kapal di Wilayah Perairan Darat	Unit	Jumlah kapal penangkap ikan di wilayah perairan darat yang memiliki izin sesuai dengan kewenangan Provinsi	9,95
66	3.25.000313	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap (Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT) yang menjadi kewenangan Provinsi	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
67	3.25.000318	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	1
68	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	Jumlah Lokasi Rehabilitasi Lahan Mangrove pada wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi merupakan jumlah besaran area Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak dan atau sama dengan kondisi awal.	8
69	3.25.000321	Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Ha	Luasan Lahan Rehabilitasi pada Perairan Pesisir sesuai dengan alokasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	8,95
70	3.25.000323	Provinsi yang telah menyusun materi teknis muatan pesisir pada RTRW Provinsi/dokumen final RZWP-3-K	Dokumen	Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K merupakan dokumen tentang muatan tata ruang perairan pesisir dan pulau-pulau yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya akan diintegrasikan dalam RTRW Provinsi	1
71	3.25.000324	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kelompok	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
72	3.25.000325	Data pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	85
73	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Kasus	Data pelanggaran kapal perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	36
74	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Jumlah personel Pengawas Perikanan	33
75	3.25.000330	Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	66
76	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kasus	Data kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
77	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaku Usaha	Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	49
78	3.25.000334	Kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	Data kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	11
79	3.25.000336	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	25
80	3.25.000337	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui	Dokumen	&Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT&	226
81	3.25.000338	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	226
82	3.25.000339	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
83	3.25.000343	Saluran di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meter Lari	data saluran irigasi perikanan dan jalan produksi perikanan budidaya	32,639
84	3.25.000344	Sampel pengujian penyakit ikan di laut yang diuji	Sampel	Jumlah sampel pengujian penyakit ikan	472
85	3.25.000345	Sumber Daya Manusia Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	data SDM Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	11
86	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	Jumlah lahan pembudidayaan ikan dalam Hektar	40871
87	3.25.000347	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang ditolak	Dokumen	Jumlah Rekomendasi penolakan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	95
88	3.25.000348	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui	Dokumen	Jumlah Rekomendasi yang disetujui atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	2,74
89	3.25.000349	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi teknis yang disetujui dengan catatan atas permohonan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT&	2,74
90	3.25.000362	Wadah Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Data wadah pembudidayaan di laut (KJA, Jaring Tancap, dan kebun bibit rumput laut)	241
91	3.25.000363	Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	Jumlah Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	630612,73
92	3.25.000365	Produksi Benih	Ekor	Produksi benih ikan air payau dan air tawar yang digunakan untuk usaha budidaya air payau dan air tawar	10095184550
93	3.25.000366	Produksi induk	Ekor	Jumlah produksi induk	7,7

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
94	3.25.000367	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1
95	3.25.000368	Laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	Dokumen	Jumlah laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	472
96	3.25.000371	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran sesuai Skala Usaha dan Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	114
97	3.25.000372	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	30
98	3.25.000373	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
99	3.25.000374	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diberikan pembinaan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	0
100	3.25.000375	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	0
101	3.25.000376	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitas	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitas	152
102	3.25.000377	Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Jumlah hasil pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi merupakan jumlah dokumen hasil rekapitulasi pemetaan kebutuhan bahan baku usaha perikanan Setiap pemegang izin usaha Bidang Pengolahan Ikan wajib membuat laporan kegiatan Usaha yang memuat asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan dan wilayah pemasaran	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
103	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	114
104	3.25.000379	Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	152
105	3.25.000380	Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	114

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
106	3.25.000381	Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.	114
107	3.25.000382	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	114
108	3.25.000383	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	114

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
109	3.25.000385	Sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	398
110	3.25.000386	Prasarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data prasarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	398
111	3.25.000387	Volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	968,353
112	3.25.000388	Volume Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	Data volume pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	299838,50
113	3.25.000389	Sarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data sarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0
114	3.25.000390	Prasarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	Data prasarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
115	3.25.000392	Hari Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas Kelautan dan perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	10
116	3.25.000393	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Dirawat	Unit	1) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan 2) Perawatan kapal pengawas Kelautan dan Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas Kelautan dan perikanan. Perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas Kelautan dan perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) 3) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 4) Perawatan prediktif adalah perawatan kapal pengawas Kelautan dan perikanan yang	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
117	3.25.000394	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)	Forum	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah merupakan Forum koordinasi antar aparat Penegakan Hukum pada tingkat Daerah Provinsi untuk mengkoordinasikan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di masing-masing wilayah kerjanya sehingga tercipta sinergisitas antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan TPKP di Daerah. Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur di mana seluruh Pemerintah Daerah Provinsi (34 provinsi) telah dibentuk. Forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah Provinsi tersebut berfungsi untuk: - Koordinasi kegiatan penyidikan TPKP tingkat - Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik TPKP pada tingkat - Penetapan jenis TPKP yang diprioritaskan untuk di proses secara - Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat -	1
118	3.25.000395	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Pelaku Usaha	1) Pelaku Usaha Pemanfaatan SDK yaitu setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan yang terdiri dari: perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan pengangkatan benda muatan kapal ekstraksi pelaksanaan bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km ² (seratur kilometer persegi); dan/atau pipa dan/atau kabel bawah penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum (36001); penampungan dan penyaluran air baku (36002).	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
119	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	1) SDM Pengawasan SDKP terdiri dari Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelollan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (Polsus PWP3K) dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat dan c. sehat jasmani dan rohani 3) Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <i>Persyaratan untuk diangkat sebagai</i>	42
120	3.25.000397	Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
121	3.25.000398	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Diadakan	Unit	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi/pemerintah daerah. Pengadaan kapal pengawas kelautan dan perikanan bagi Pemda Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan provinsi yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas IV (12-&25 meter) dan kelas V (&12 meter).	0
122	3.25.000399	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	1) Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya kelautan dan 3) Bangunan Operator adalah tempat tinggal untuk pengawas kelautan dan 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dan kelautan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
123	3.25.000400	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang per orang atau korporasi dengan ancaman hukuman pidana antara lain berupa kurungan badan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU bidang kelautan dan perikanan. 2) Sanksi pidana di bidang kelautan dan perikanan diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh orang per orang dan/atau korporasi yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 3) Penanganan perkara pidana bidang kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang yang menjadi kewenangannya atau KUHAP. 4) Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan dalam rangka pengangkatan Pejabat PPNS Perikanan, maka PPNS Perikanan Pusat memiliki wilayah kerja	0
124	3.25.000412	Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	Dokumen Final RZWP-3-K yang memuat Peta Struktur Ruang Laut, Peta Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta KKPRL dan Matriks KKPRL	0
125	3.25.000413	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memuat dengan dokumen final pengaturan ruang darat dan pengaturan ruang laut.	1
126	3.25.000414	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen	Dokumen Hasil Rekomendasi dan Evaluasi dalam rangka peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir (RZWP-3-K)	0
127	3.25.000415	Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	0
128	3.25.000416	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	25799

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
129	3.25.000418	Volume Produksi Garam	Ton	Volume produksi garam lokal pada SEGAR merupakan Jumlah volume garam yang dihasilkan oleh rakyat maupun perusahaan yang berada di wilayah SEGAR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lainnya yang tidak berada pada wilayah SEGAR.	53661256
130	3.25.000419	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi	Lokasi	Data lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi sesuai kewenangan Provinsi	24
131	3.25.000420	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut yang diawasi sampai dengan 12 Mil	74
132	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	Data pelanggaran bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan	25
133	3.25.000422	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	19
134	3.25.000428	Lahan Garam	Ha	Luas Lahan Garam, Luas area yang digunakan untuk produksi garam	684584
135	3.25.000429	Petambak Garam	Orang	Petambak Garam, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi garam	10,24
136	3.25.000430	Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman	Dokumen	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan menjadi Dokumen Perencanaan dan paling sedikit memuat Detail Engineering Design Usaha Pergaraman dan/atau master plan kawasan.	6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
137	3.25.000431	Gudang Garam	Unit	Gudang Garam adalah tempat penyimpanan garam di tempat yang aman dan tidak mengurangi kadar garam yang telah dihasilkan	397
138	3.25.000432	Sarana Usaha Pergaraman	Unit	Sarana Usaha Bagi Petambak Garam seperti : Mesin pemurnian Garam, Mesin Sealer Geomembran dan perlengkapannya, Generator, alat pembersih meja garam, mesin jahit karung	3
139	3.25.000433	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuh kembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit	0
140	3.25.000434	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	Jumlah kelompok yang mengoperasikan dan memelihara prasarana tambak garam, secara khusus yaitu prasarana saluran irigasi dan kolam penampungan air muda. Untuk operasional serta pemeliharaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat.	262
141	3.25.000435	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru yang melakukan Perizinan Berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi dan juga Persetujuan penangkapan ikan dengan tujuan wisata yang menjadi kewenangan daerah dalam mendukung penangkapan ikan terukur	0
142	3.25.000436	Kegiatan Turnamen Memancing Di Wilayah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kegiatan	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan secara berkala di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
143	3.25.000437	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	0
144	3.25.000438	Luas kawasan ekosistem blue carbon Pada Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Ha	Luas kawasan ekosistem blue carbon (Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan) yang dipetakan secara spasial yang terverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi	9484,96
145	3.25.000439	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang mengelola dan melestarikan ekosistem padang lamun dan mangrove di luar kawasan hutan yang mengalami peningkatan kapasitas meliputi: - pemahaman terkait pentingnya ekosistem blue carbon - melakukan pemantauan/monitoring, pengukuran dan verifikasi ekosistem blue carbon - melakukan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim blue carbon yang terintegrasi dengan Sistem MRV Blue Carbon	0
146	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Kewenangan Provinsi	9,65
147	3.25.000441	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi	Sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional yang terkoneksi dari hulu sampai hilir seperti produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.	0
148	3.25.004101	Rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	14

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
149	3.25.004106	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	14
150	3.25.004107	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	5
151	3.25.004108	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	14
152	3.25.004109	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	5
153	3.25.004110	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan	1
154	3.25.004111	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan	1
155	3.25.004112	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi		&Juklak, Juknis, SOP Perizinan berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan&	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
156	3.25.004113	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	410745,59
157	3.25.004114	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	554810,18
158	3.25.004124	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	208
159	3.25.004125	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	208
160	3.25.004126	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	208

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
161	3.25.004138	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	Pedoman yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dasar menerbitkan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	1
162	3.25.004140	Rekomendasi izin tanda daftar Kapal Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	2,63
163	3.25.004141	Permohonan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	Dokumen	Jumlah rekomendasi izin TDKP untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	2,63
164	3.25.004142	UPT Pengelola	Unit	SK KDH Penetapan UPT Pengelola	1
165	3.25.004145	Penyediaan fasilitas Penunjang	Unit	&Penyediaan Fasilitas penunjang berdasarkan sumber dana/anggaran&	11
166	3.25.004146	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan	6191583705718
167	3.25.004147	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	1
168	3.25.004148	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
169	3.25.004149	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	1
170	3.25.004150	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan adalah banyaknya dokumen yang berisi rekomendasi dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi yang diterbitkan	1
171	3.25.004157	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
172	3.25.004158	Data potensi lahan budidaya berdasarkan RZWP3K	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
173	3.25.004159	Data lahan existing yang sudah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya laut	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
174	3.25.004160	Data jenis ikan / komoditas yang dibudidayakan	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
175	3.25.004161	Data produksi benih dari unit pembenihan/hatchery	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
176	3.25.004163	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
177	3.25.004164	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota yang memiliki kartu KUSUKA	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
178	3.25.004169	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	1
179	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare), Pembentukan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
180	3.25.004171	Sarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Laboratorium Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	1
181	3.25.004172	Prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	1
182	3.25.004173	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	1
183	3.25.004180	Izin penempatan dan pemanfaatan Rumpon	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi surat izin Penempatan Rumpon yang diterbitkan pada perairan yang menjadi kewenangan provinsi	0
184	3.25.004181	Pelabuhan Perikanan	Unit	jumlah prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur	11
185	3.25.004183	Peralatan dan mesin penunjang pendataan penangkapan ikan terukur	Unit	Jumlah sarana pendukung pendataan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	0
186	3.25.004184	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan	6191583705718
187	3.25.004185	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan	410745,59
188	3.25.004186	Unit penangkapan ikan	Unit	jumlah sarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur sesuai dengan NSPK dan kewenangannya	0
189	3.25.004187	Kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	Kegiatan	Jumlah kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	11
190	3.25.004188	mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan	Unit	Jumlah mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan untuk pembudidaya ikan di air payau atau air tawar	55

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.26.000006	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola	1
2	3.26.000007	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi	1
3	3.26.000008	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi	1
4	3.26.000009	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Provinsi untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Provinsi dengan pola stimulasi, identifikasi dan Profiling	0
5	3.26.000010	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARPROV melalui SK penetapan oleh Gubernur	6
6	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen		0
8	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi	0
9	3.26.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan provinsi)	0
10	3.26.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan provinsi)	0
11	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	1
12	3.26.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan lokal	1
13	3.26.000030	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan kajian terkait hasil dari sistem pemasaran yang sudah ada	0
14	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektronik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1
15	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektronik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0
16	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0
17	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	3.26.000043	Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	1
19	3.26.000045	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	0
20	3.26.000047	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta terintegrasi dengan dokumen RTRW dan RDTR daerah	0
21	3.26.000050	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen		0
22	3.26.000053	Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan		2
23	3.26.000055	Laporan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan LSP P3 Sub Sektor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025	0
25	3.26.000058	Laporan Hasil Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Bidang Pariwisata	Laporan	Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata adalah kegiatan fasilitas pendirian LSP baik bagi industri (P3) dan pendidikan (P1) bidang pariwisata yang bekerjasama dengan BNSP, berdasarkan NSPK Pedoman BNSP 202 Pedoman Pembentukan Pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	0
26	3.26.000059	Laporan Hasil Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 Bidang Pariwisata	Laporan	Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata adalah kegiatan fasilitas pendirian LSP baik bagi industri (P3) dan pendidikan (P1) bidang pariwisata yang bekerjasama dengan BNSP, berdasarkan NSPK Pedoman BNSP 202 Pedoman Pembentukan Pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	0
27	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan		1
28	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	Laporan	Melakukan indentifikasi UMKM dan produk-produknya, dan mengklasifikasi produk serta UMKM yang dapat dipasarkan secara lebih luas	0
29	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)	0
30	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan		1
31	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang		33237866

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
32	3.26.000118	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dokumen		0
33	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah		0
34	3.26.000142	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi	Unit Usaha		0
35	3.26.000143	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi	Unit Usaha		0
36	3.26.000148	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait akademisi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur akademisi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
37	3.26.000149	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
38	3.26.000150	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait komunitas penggiat bidang pariwisata	Data	Mengidentifikasi dan mendata keberadaan unsur komunitas penggiat bidang pariwisata di tingkat Provinsi	0
39	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
40	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&	0
41	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	0
42	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	Data	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	0
43	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	0
44	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	0
45	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.	0
46	3.26.000170	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata	0
47	3.26.000173	Lokasi pembangunan peningkatan kualitas pada daya tarik wisata unggulan Provinsi yang berbasis alam/budaya/buatan manusia	Lokasi	Mengidentifikasi dan mendata daya tarik wisata unggulan Provinsi yang dilakukan pembangunan/pengembangan fisik dan non fisik	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
48	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan &	0
49	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan &	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
50	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan	0
51	3.26.000179	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	876
52	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	1
53	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0
54	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0
55	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0
56	3.26.000184	Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0
57	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata	0
58	3.26.000186	Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	Melakukan bimbingan teknis/workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM Ekraf melalui program Fasilitasi/pendukungan yang dilakukan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
59	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		Ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop	0
60	3.26.000194	Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	0
61	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.	0
62	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	15716
63	3.26.000197	Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
64	3.26.000198	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata	0
65	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0
66	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	0
67	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0
68	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
69	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0
70	3.26.000207	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0
71	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati	0
72	3.26.000211	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
73	3.26.000213	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang		0
74	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	280
75	3.26.000216	Data kegiatan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan	Laporan	Memberikan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	160
76	3.26.000219	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
77	3.26.000220	Daya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0
78	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
79	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0
80	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	110
81	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	110
82	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0
83	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0
84	3.26.000236	Data Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata yang difasilitasi pelatihan	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	0
85	3.26.000237	Data kegiatan pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Orang	Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
86	3.26.000238	Data ASN di daerah yang memahami tentang kepariwisataan setelah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	0
87	3.26.000239	Jumlah kegiatan Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan yang telah dilaksanakan	Orang		0
88	3.26.000243	Data Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	0
89	3.26.000244	Data Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang telah dilaksanakan	Orang		0
90	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0
91	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0
92	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	200
93	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	200

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
94	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	110
95	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	110
96	3.26.000257	Data Pelaku Usaha Ekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0
97	3.26.000258	Data ASN di daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	Melaksanakan Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	0
98	3.26.000270	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Lembaga	Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi kreatif daerah mencakup inisiasi, koordinasi, dan pendirian badan hukum lembaga/asosiasi/pelaku usaha	0
99	3.26.000271	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukung pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	0
100	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	Kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif dalam bentuk pemberian konsultasi kekayaan intelektual	2
101	3.26.000278	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	0
102	3.26.000279	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	0
103	3.26.000280	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
104	3.26.000281	Perencanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kab/Kota adalah Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata tingkat Kabupaten/Kota sebagai acuan pelaksanaan yang terdiri atas Penyusunan tahapan kerangka penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota serta formulasi rencana aksi tindak lanjut pengukuran Indeks	0
105	3.26.000282	Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota menggunakan kerangka penilaian berupa indikator yang disesuaikan dengan ketersediaan data setempat dengan menggunakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
106	3.26.000284	Penetapan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota memperoleh ketetapan hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dari provinsi yang melakukan penilaian dan SK Gubernur tersebut dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri	1
107	3.26.000286	Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Dokumen	Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasia, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
108	3.26.000287	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator	0
109	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	0
110	3.26.000289	Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk	Kegiatan Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki KI mendapatkan nilai tambah dari KI tersebut. Dengan demikian, jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memiliki sertifikat HKI akan mendapat manfaat dari komersialisasi KI. Fasilitasi Komersialisasi KI bertujuan untuk mendorong Inovasi dan Kreatifitas di kalangan pelaku industri ekonomi kreatif, Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pembentukan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan, Promosi Kreativitas Lokal, dan Penyediaan Akses Keuangan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
111	3.26.000292	Produk yang Memperoleh Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Produk	Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya dan inovasi yang mereka ciptakan, seperti karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang dilindungi secara hukum.	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.27.000021	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Laporan	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	3
2	3.27.000026	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian oleh penyuluh pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	12
3	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	Laporan	Jumlah sebaran populasi ternak strategis yang sesuai dengan nilai budaya, ekonomi dan kemanfaatan rumpun atau galur	1
4	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	Banyaknya Benih hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih	140
5	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	Sertifikat	Jumlah keterangan benih tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh institusi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu)	2708
6	3.27.000224	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan	Sertifikat	Banyaknya Benih perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih	140
7	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu lintas hewan dan produk hewan	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu-lintas hewan dan produk hewan di lapangan	3
9	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	120203324
10	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	120203324
11	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	1409639
12	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	1409639
13	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	1409639
14	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	4021,13
15	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	4021,13
16	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	4021,13

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
17	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Banyaknya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	1166733
18	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PRT)	1166733
19	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat	1166733
20	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	19989,34
21	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	19989.34
22	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	19989,34

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
23	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
24	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	0
25	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0
26	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	37000
27	3.27.000264	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi	Ton	Banyaknya benih umbi/ rimpang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	16,65
28	3.27.000265	Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi	Anakan	Banyaknya benih anakan perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0
29	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	55400
30	3.27.000267	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	Banyaknya benih perkebunan berbentuk biji yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
31	3.27.000268	Jumlah benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi	Mata	Banyaknya benih mata perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	35427,9
32	3.27.000269	Jumlah benih perkebunan berbentuk setek yang diperbanyak/ diproduksi	Setek	Banyaknya benih perkebunan berbentuk setek yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	84746
33	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	Jumlah Benih Ternak yang beredar	143010
34	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	143010
35	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi	81249
36	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu	143010
37	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	Banyaknya benih ternak yang tersedia	683630
38	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	0
39	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	54
40	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	54
41	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	109017
42	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	54
43	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi	54
44	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang tersedia	109908
45	3.27.000283	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas	3
46	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas	0
47	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	Terkendalnya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
48	3.27.000290	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian oleh penyuluh pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	12
49	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Benih/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	0
50	3.27.000295	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	Jumlah eksisting dam parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan debit air minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m	5
51	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	5
52	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik	564
53	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	266
54	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	Jumlah Laboratorium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik	6
55	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
56	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius	6
57	3.27.000303	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi	35
58	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	Jenis obat hewan yang beredar dan digunakan	78600
59	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	1
60	3.27.000306	Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Kasus	kasus pelanggaran yang terjadi dan diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan	2
61	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	250
62	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	7
63	3.27.000310	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik	129
64	3.27.000311	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik	168
65	3.27.000313	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik	34
66	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskesmas	Unit	Banyaknya Puskesmas yang berfungsi baik	88
67	3.27.000316	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan	4
68	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	1
69	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
70	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	1
71	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya	5494
72	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit	17
73	3.27.000323	Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara	Unit	banyaknya embung yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan budidaya pertanian	5
74	3.27.000324	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0
75	3.27.000325	Jumlah Eksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	Ketersediaan Laboratorium Benih atau Balai Benih yang melakukan peredaran Benih di Provinsi	1
76	3.27.000326	Jumlah Eksisting Laboratorium Pertanian	Unit	Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik	10
77	3.27.000327	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	55
78	3.27.000328	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	11
79	3.27.000329	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	11
80	3.27.000330	Jumlah galur yang dinilai	Galur	Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan	5
81	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusaha peningkatan kualitas	11
82	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan	148183
83	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	266

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
84	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	266
85	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	266
86	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain	2
87	3.27.000371	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan	2709
88	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya	4
89	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continuous sealer, freezer	2
90	3.27.000374	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan	4
91	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
92	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.	5
93	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	5
94	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	5
95	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	25
96	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	660
97	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi	4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
98	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0
99	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi	2
100	3.27.000397	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0
101	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi	1689059
102	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP	25
103	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)	5
104	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
105	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1
106	3.27.000405	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1
107	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.	13

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
108	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.	5
109	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	3
110	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	1
111	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	Ketersediaan Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	7
112	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih/bibit ternak bersertifikat yang beredar	1
113	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner)	40
114	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0
115	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terdampak bencana alam	0
116	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	60358,44
117	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0
118	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0
119	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	60358,44

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
120	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	0
121	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	0
122	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	0
123	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	0
124	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim	60358,44
125	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	60358,44
126	3.27.000431	Jumlah Luas lahan penggembalaan umum yang ditetapkan	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang ditetapkan dapat dimanfaatkan/digunakan	104
127	3.27.000432	Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang dikelola pemanfaatannya dengan baik	104
128	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	23877
129	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	23877
130	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT	23877
131	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	23877

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
132	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	40359
133	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	40359
134	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis	140
135	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masyarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	140
136	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	1
137	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangunan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	2709
138	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	10
139	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	40

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
140	3.27.000450	Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	0
141	3.27.000451	Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	Laporan	Banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap lahan penggembalaan umum	0
142	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	41
143	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	12
144	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	12
145	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	1
146	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
147	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota	1
148	3.27.000464	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Dosis	Penyediaan Benih Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus benih ternak	239000
149	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	14
150	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak	0
151	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit	12
152	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan	12
153	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	12
154	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	12
155	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	12
156	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	1
157	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan	12

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
158	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	660
159	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	kegiatan Pengelolaan Pestisida meliputi Pendataan Pestisida yang beredar, Pemberian informasi kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif, serta alternatif ramah lingkungan, pengawasan terhadap distribusi dan memberikan pemahaman kepada petani khususnya dalam membaca label agar petani terhindar dari kesalahan dalam penggunaan pestisida	1000
160	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	1238307,23
161	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	2
162	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	4
163	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	4
164	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
165	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	5494
166	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	2
167	3.27.000496	Jumlah pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangunan dan alat pengolahan yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	4
168	3.27.000498	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi	28008
169	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi	250
170	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi	900
171	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	238
172	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah	23

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
173	3.27.000504	Jumlah perbanyak/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	Jumlah perbanyak/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	367,37
174	3.27.000505	Jumlah perbanyak/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	Setek	Jumlah perbanyak/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	0
175	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	265
176	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	49
177	3.27.000513	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan	198867
178	3.27.000514	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan	198867
179	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	198867
180	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	7
181	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	7
182	3.27.000520	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan	129

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
183	3.27.000521	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	129
184	3.27.000522	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara	Unit		129
185	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hortikultura	129
186	3.27.000524	Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan	168
187	3.27.000525	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan	Unit	Ketersediaan prasarana pascapanen hasil peternakan yang sesuai dengan prosedur penanganan pascapanen	77
188	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	4
189	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura	129
190	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	banyaknya prasarana pendukung perkebunan	168
191	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	34
192	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengolahan hortikultura	129
193	3.27.000532	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan	168
194	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil tanaman pangan	4
195	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
196	3.27.000535	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan	168
197	3.27.000536	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	168
198	3.27.000541	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan	34
199	3.27.000542	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	34
200	3.27.000546	Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan	Ton	Banyaknya produksi bahan pakan/pakan ternak yang dihasilkan	1202033240
201	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan	248550
202	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan	109908
203	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan	5596
204	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayah yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	1070
205	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayah yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	2266
206	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura	1
207	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan perkebunan	1
208	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan	1
209	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan	1
210	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana hortikultura	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
211	3.27.000561	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana perkebunan	1
212	3.27.000568	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan	1
213	3.27.000569	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Rumpun	Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	11
214	3.27.000570	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	11
215	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.	5
216	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusaha peningkatan kualitas	11
217	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu	1
218	3.27.000574	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan	783609
219	3.27.000575	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan	783609

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
220	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	5
221	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	660
222	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.	1000
223	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	1238307,23
224	3.27.000586	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Unit	jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok/ petani, dalam kondisi baik	5494

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
225	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.	135
226	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik	38
227	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	12175
228	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persyaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan nenvakit hewan	4703
229	3.27.000591	Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian	1
230	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	35
231	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu	6
232	3.27.000602	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
233	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	6
234	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota	1025254,98
235	3.27.000606	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi	1025254,98
236	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	990824
237	3.27.000610	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	990824
238	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)	155
239	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	luas area kawasan perkebunan eksisting	423
240	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Luas area kawasan tanaman pangan	3976
241	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota	1025254,98

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
242	3.27.000616	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi	1025254,98
243	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&	990824
244	3.27.000620	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.	990824
245	3.27.000624	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
253	3.27.000668	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)	5431,3
254	3.27.000673	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan	Unit	Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil peternakan	0
255	3.27.000680	Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi	Unit Usaha	Pengawasan dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan	4
256	3.27.000681	Data Pekebun	Pekebun	Jumlah pekebun yang berusaha pada budidaya tanaman perkebunan dan memiliki STDB	1066

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	985
2	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	Kasus	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit adalah Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dengan alat ukur Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar dengan satuan laporan	32
3	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	Ha	Luas Ekosistem yang dipulihkan melalui kegiatan penanaman bersama masyarakat, pemeliharaan tanaman, pengayaan, penanganan gulma, penanganan IAS (invasif Alien Species), pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam.	0
4	3.28.000004	Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Luas Kawasan Hutan yang telah ditargetkan untuk dilakukan Pengamanan Kawasan Hutan (Preventif dan Represif) terkait Perambahan Kawasan hutan dan pertambangan ilegal	2549,3
5	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Luas Kawasan mangrove yang dilakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan dan kegiatan pendukungnya meliputi prakondisi, penyusunan rancangan teknis, pendampingan, pengawasan dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi	124
6	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih termasuk pemeliharaannya dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	6,49

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
7	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Melakukan kegiatan Patroli dan Operasi (Preventif dan Represif) Hasil Hutan Illegal (illegal logging, perburuan liar, dan lain-lainnya terkait dengan ekosistem)	2549,3
8	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara termasuk kegiatan penanaman vegetatif, pemeliharaan serta kegiatan pendukungnya	2315
9	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pendukung pembangunan sumber benih	Ha	Pembangunan Sumber Benih adalah Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih dengan alat ukur Luas sumber benih yang dibangun dengan satuan Hektar	6,49
10	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	Pelaksanaan prakondisi kawasan perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan) meliputi sosialisasi tingkat tapak, pencermatan PIAPS, fasilitasi usulan dan monitoring termasuk penyelesaian konflik tenurial dalam kerangka perhutanan sosial	0
11	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Kegiatan penanaman di luar kawasan hutan termasuk Proyek Strategis Nasional/PSN pada greenbelt atau sekitar danau untuk kegiatan penanaman di fasilitas sosial/umum selain di hutan rakyat dan hutan kota	1653
12	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan layanan dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan satuan jumlah dokumen	14
14	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung yang memuat luas	4
15	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	0
16	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0
17	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	Dokumen	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS termasuk pengelolaan danau	1
19	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	Pembuatan laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1
20	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Dokumen	Menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	1
21	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	Dokumen	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
22	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit	Melakukan pemantauan pelaksanaan kewajiban pelaporan RKOPHH dan Laporan Kinerja Bulanan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi.	0
23	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	Dokumen	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan Bukan Kayu) Skala Usaha Kecil dan Menengah berikut pelaksanaan penerapan sanksi administratif (jika diperlukan).	1
24	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap RKUPH dan RKHTML	1
25	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	Melakukan Perencanaan Pemulihan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	1
26	3.28.000039	Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	Melakukan fasilitasi terkait pengajuan dan rencana pengelolaan KHDTK, Pengelolaan KHDTK	1
27	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	1
28	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	Kasus	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kehutanan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kehutanan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	Kasus	Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung wilayah DAS	1
30	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan.	Permohonan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Tahura adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam tahura yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Wisata Alam, pemanfaatan air dan energi air, pemanfaatan Panas Bumi	50
31	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelaksana penanganan kerusakan lahan basah.	Kasus	Melakukan Pananganan Kerusakan Lahan Basah (gambut dan mangrove)	0
32	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan hasil hutan (ilegal logging dan perburuan liar)	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
33	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	Kegiatan	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	2549,3
34	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	Kasus	Melakukan intervensi manajemen pengelolaan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam appendix cites meliputi inventarisasi, pemantauan, penyelamatan, pembinaan populasi, pembinaan habitat, serta penelitian dan pengembangan	0
35	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Kegiatan	Peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	3
36	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	Melakukan pengendalian konflik satwa liar dengan manusia, melalui penanaman tumbuhan pakan satwa, mitigasi konflik satwa dan manusia dengan membentuk pokja penanganan konflik, patroli terpadu	0
37	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	Kasus	Melakukan pengendalian kerusakan ekosistem karst melalui kajian kerusakan, kajian ekosistem referensi, mekanisme penanganan dan keterlibatan para pihak dilengkapi dengan peta kawasan.	0
38	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	Melaksanakan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan menuju KTH mandiri dan Kelompok Perhutanan Sosial melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	1000

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
39	3.28.000056	Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	1
40	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	Kasus	Melakukan inventarisasi dan verifikasi area dengan keanekaragaman hayati tinggi meliputi kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa secara langsung di lapangan/ground check, analisis data sekunder, analisis data hasil ground check untuk dilakukan verifikasi	1
41	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	Fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH skala Kecil dan Menengah	0
42	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi kegiatan pencegahan , penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. (detil jenis-jenis kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan dapat merujuk pada PMK No.216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi)	0
43	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	Melakukan Kegiatan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
44	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan dalam rangka penyelesaian Kasus Pidana (P-21) dan Perdata bidang Kehutanan	2
45	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	Kasus	Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama TAHURA provinsi dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	3
46	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	Kasus	Melakukan Pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (bernilai keanekaragaman hayati tinggi Kewenangan Daerah Provinsi	0
47	3.28.000066	Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit.	Kasus	Penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko berupa kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani melalui Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA)	32

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
48	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan (Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swasta, Polisi Kehutanan, Manggala Agni, MMP, MPA)	90
49	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSI, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSI.	Laporan	Melakukan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk Lampiran Cites personil Polisi Kehutanan yang didukung dengan Sarana Prasarana yang memadai	1
50	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	Personil	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	8
51	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	Kasus	Sertifikat mutu benih adalah terlaksananya sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	24
52	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	Kasus	Sertifikat mutu bibit adalah terlaksananya sertifikasi mutu bibit dengan alat ukur jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Mutu Bibit dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	107
53	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	Kasus	Sertifikat sumber benih adalah pelaksanaan sertifikasi sumber benih dengan alat ukur jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan dengan satuan sertifikat (bagi Provinsi yang memiliki UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dan telah mendapatkan SK Pelaksana Sertifikasi Sumber Benih dari KLHK c.q Ditjen PDASRH)	18

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
54	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS	Lembaga	Membentuk forum baru dan/atau mengembangkan forum DAS yang sudah ada termasuk kelompok kerja mangrove daerah	2
55	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS	Unit	Jumlah bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	985
56	3.28.000079	Unit manajemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	Fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan Menengah untuk memperoleh pasokan bahan baku dan akses Pasar.	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN

: 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.29.000004	Data Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	0
2	3.29.000005	Data Penjualan Tenaga Listrik;	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan tenaga listrik.	1
3	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	Perusahaan	Jumlah perusahaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin.	0
4	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Unit	Jumlah cekungan air tanah dalam daerah provinsi.	4
5	3.29.000009	Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil)	Unit	Jumlah pembangkit listrik yang berbasis EBT dan fosil yang masih beroperasi.	103
6	3.29.000010	Data Harga Jual Tenaga Listrik;	Rupiah	Total biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.	3,20785E+18
7	3.29.000011	Data Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	28841
8	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Km ²	Luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	3621
9	3.29.000013	Data Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Unit Usaha	Jumlah Perusahaan Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah dilakukan pembinaan.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
10	3.29.000014	Data Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang telah ditetapkan.	1
11	3.29.000015	Data Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Jumlah penjualan kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi.	0
12	3.29.000016	Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kasus	Jumlah kasus penetapan Nilai Perolehan Air Tanah atau nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah khususnya dalam daerah provinsi yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
13	3.29.000020	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kasus	Jumlah kasus Perizinan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
14	3.29.000022	Data Penyimpangan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Kasus	Jumlah kasus zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya yang implementasinya tidak dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0
15	3.29.000023	Data Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri.	156

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
16	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Operasi atau izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang masih berlaku.	788
17	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen jumlah realisasi anggaran penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	1
18	3.29.000027	Data Realisasi Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	28841
19	3.29.000030	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang telah direkomendasikan.	0
20	3.29.000031	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang telah direkomendasikan.	0
21	3.29.000032	Data Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
22	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik.	1
23	3.29.000034	Data Rumah Tangga Tidak Mampu	Dokumen	Dokumen Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu.	1
24	3.29.000036	Data Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan	Titik	Jumlah Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan.	3
25	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	Dokumen rencana Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang akan dicapai.	1
26	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	Dokumen Jumlah Wilayah yang Belum Teraliri Listrik.	0
27	3.29.000039	Data Zona Konservasi Air Tanah;	Zona	Jumlah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya.	4
28	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	Penghasil listrik yang bersumber dari Tenaga Sinar matahari (surya)	3456

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya		2
2	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang		150
3	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beriodium	6
4	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beriodium	6
5	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	Barang	Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beriodium	6
6	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang		4210
7	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		0
8	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Distributor		6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
9	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen		0
10	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa		4
11	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi		3867
12	3.30.000018	Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan		21
13	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan		0
14	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan		2
15	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan		1
16	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan		2
17	3.30.000032	Laporan komoditi potensial yang dipantau	Laporan		10
18	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan		32
19	3.30.000034	Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Laporan		0
20	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan		2
21	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan		115
22	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan		51
23	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan		3
24	3.30.000040	Laporan Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang telah berpartisipasi	Laporan		1
25	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan		4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
26	3.30.000042	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Laporan		1
27	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Laporan		20
28	3.30.000055	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida	Kegiatan		0
29	3.30.000056	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Kegiatan		2
30	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan		2
31	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha		30
32	3.30.000087	Pengawasan Pengadaan Pupuk di Tingkat Daerah Provinsi	Pupuk		3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
33	3.30.000088	Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan		21
34	3.30.000089	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan		21
35	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk		8109
36	3.30.000100	Pusat Distribusi Provinsi yang telah terlaksana	Unit		0
37	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA		114205

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan		1
2	3.31.000028	Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun	Dokumen		0
3	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen		3
4	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data		9
5	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		33.84
6	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		373
7	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		8214
8	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		8214
9	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data		225
10	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data		8123
11	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data		51

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen		3

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan peniaian.	4
2	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan teknisnya.	16
3	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	16
4	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satunya kepala keluarga)	0
5	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.	16
6	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	Jumlah Calon transmigran atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.	16
7	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	16
8	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.	16
9	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.	2
10	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Naskah kerja sama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	19

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	407
12	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	16
13	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)	16
14	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	95
15	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	19
16	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	19
17	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	55

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi	16
19	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal	16
20	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal	16
21	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi	16
22	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.	16
23	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	16

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan peniaian.	4
2	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan teknisnya.	16
3	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	16
4	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satunya kepala keluarga)	0
5	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.	16
6	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	Jumlah Calon transmigran atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.	16
7	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	16
8	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.	16
9	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.	2
10	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Naskah kerja sama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	19

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
11	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	407
12	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	16
13	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)	16
14	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	95
15	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	19
16	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	19
17	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	55

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi	16
19	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal	16
20	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal	16
21	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi	16
22	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.	16
23	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	16

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		4
2	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		4
3	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen		4
4	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen		4
5	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen		4
6	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan		0
7	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen		4
8	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen		6
9	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen		4
10	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen		4
11	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen		4
12	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen		45
13	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen		4
14	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		37

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
15	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen		9
16	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen		6
17	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan		4
18	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit		1055
19	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga		8
20	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen		8
21	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen		8
22	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen		8
23	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen		8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen		8
25	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen		52
26	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen		670
27	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen		751
28	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen		653
29	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus		17
30	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus		18
31	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen		1
32	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen		1
33	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen		4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
34	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen		4
35	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen		4
36	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen		1
37	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen		1
38	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen		1
39	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen		1
40	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen		1
41	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		4
42	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		12
43	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
44	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan		4
45	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2
46	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		4
47	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	187
48	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		4
49	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		4
50	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan		2
51	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan		2
52	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan		4
53	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen		2
54	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
55	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen		2
56	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		200
57	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		1
58	4.01.000148	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen		1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen		5
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang		100
3	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen		5
4	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen		5
5	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1
6	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		2,10E+01
7	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		15
8	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		6
9	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		1
10	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang		100
11	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1
12	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		1
13	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
14	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		1
15	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		2
16	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1
17	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		48
18	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		48
19	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		48
20	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		48
21	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		48
22	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		2
23	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		31
24	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		7
26	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		6
27	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		42
28	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		8
29	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		12
30	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1
31	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		5
32	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		250
33	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		1
34	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		16
35	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		0
36	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		1
37	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen		14
38	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		14
39	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		37

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
40	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		47
41	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		12
42	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		6
43	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen		9
44	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen		1
45	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		0
46	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.01.000001	Aparatur yang menanggapi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menanggapi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	4
2	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	51
3	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2
4	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	2
5	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	1
6	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2499
7	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	2
9	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	2
10	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1
11	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	1
12	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	3
13	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	70
14	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
15	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah	1
16	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1
17	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1
18	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1
19	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	2
20	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
21	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konduktasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	3
22	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan	1
23	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	2
24	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	1
25	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	1
26	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
27	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	1
28	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	1
29	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	3
30	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4
31	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4
32	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2
33	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1
34	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
35	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4
36	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan informasi dalam pembangunan daerah	150
37	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	150
38	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2
39	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2
40	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3
41	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
42	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	16
43	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	13
44	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	13
45	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3
46	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
47	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	1
48	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	16
49	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	13
50	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	13
51	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
52	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	51
53	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	450
54	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	150

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 5.02 - KEUANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		2
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2
3	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		3
4	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		2
5	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		0
6	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		0
7	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		0
8	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		35
9	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		0
10	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		12
11	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		684

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen		43
13	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		180
14	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		2
15	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0
16	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		6
17	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
18	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen		2
19	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		5
20	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		3
21	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang		1200
22	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		5
23	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		1030
24	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		42
25	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1
26	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		41
27	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		0
28	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
29	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		1
30	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		41
31	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		3
32	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		0
33	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		84
34	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		4
35	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		4
36	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		4
37	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		0
38	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		4
39	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		4

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
40	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan		4
41	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		4
42	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		4
43	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		4
44	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		4
45	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		2

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN :5.03 - KEPEGAWAIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.	1
2	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		1
3	5.03.000004	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan		1
4	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		1
5	5.03.000007	Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan		1
6	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		1
7	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1
8	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		1
9	5.03.000012	Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan		1
10	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		1
11	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		1
13	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		1
14	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		1
15	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan		1
16	5.03.000028	Fungsional ASN yang Dibina	Orang		240
17	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen		1
18	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan		1
19	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		1
20	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		330
21	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		6931
22	5.03.000036	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen		1
23	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		3025
24	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
25	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		92
26	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan		1
27	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang		411
28	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang		4676
29	5.03.000070	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		2
2	5.04.000002	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		40
3	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		136989
4	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen		0
5	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen		5
6	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen		0
7	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang		623

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
8	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		0
9	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		0
10	5.04.000010	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		30
11	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		0
12	5.04.000012	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen		38

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
13	5.04.000013	ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0
14	5.04.000014	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0
15	5.04.000015	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0
16	5.04.000016	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi		0
17	5.04.000017	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan		0
18	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen		35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
19	5.04.000022	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		2
20	5.04.000023	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga		0
21	5.04.000024	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang		0
22	5.04.000027	Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		0
23	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
24	5.04.000029	Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen		0
25	5.04.000032	ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0
26	5.04.000034	Laporan Koordinasi Pen	Laporan		0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen		1
2	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		1
3	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		1
4	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		1
5	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		1
6	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		0
7	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		1
8	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		0
9	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
10	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		1
11	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		1
12	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		1
13	5.05.000050	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		1
14	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan		1
15	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan	0
16	5.05.000064	Publikasi Ilmiah	naskah	Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin	0
17	5.05.000065	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi	Lembaga	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.	0
18	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
19	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian.	0
20	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.	1
21	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.	1
22	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi.	1
23	5.05.000071	Kebun Raya Daerah	Unit	Kebun Raya Daerah adalah kebun raya botani yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka pertunjukan atau sarana rekreasi bagi masyarakat umum.	1
24	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	112
25	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.	0
26	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
27	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	0
28	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	15
29	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawaratan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.	0
30	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pembelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.	0
31	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.	1
32	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.	0
33	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
 URUSAN : 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan		2
2	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan		1
3	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan		1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024
URUSAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		11
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		1
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		1
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		2
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan		21
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		1
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		4
8	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		49
9	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		1
10	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		1
11	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		49

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
12	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		49
13	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		40
14	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		0
15	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		8

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024

URUSAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	30
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	30
3	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	5
4	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Anggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	5
5	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	5
6	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	5
7	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekrutment dan seleksi	5
8	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	5
9	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	5

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
10	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	5
11	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	5
12	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	5
13	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	8
14	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	10
15	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	58
16	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh anggota paskibraka selama pelatihan	58
17	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekrutment calon anggota paskibraka	58
18	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	5
19	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyediaan sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	75
20	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	75
21	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila	75

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
22	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000
23	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000
24	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	75
25	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	5
26	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayaan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5
27	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayaan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	10
28	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	5
29	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	4
30	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	4
31	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	4
32	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyediaan ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
33	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000
34	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000
35	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
36	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	5
37	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1
38	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1
39	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1
40	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
41	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	75
42	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1
43	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1
44	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
45	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	205
46	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	1
47	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1
48	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	500

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
49	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1
50	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1
51	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)	500
52	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	500

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
53	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
54	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)	1
55	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
56	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500
57	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250
58	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
59	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Dokumen Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (SK Keanggotaan, laporan Kegiatan tahun sebelumnya)	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
60	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)	1
61	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)	1
62	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250
63	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya	1
64	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1
65	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3725

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai
1	2	3	4	5	6
66	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	35
67	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)	1
68	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	3

Keterangan:

1. Kolom 1: merupakan nomor urut;
2. Kolom 2: Kode DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
3. Kolom 3: Uraian DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
4. Kolom 4: Satuan DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
5. Kolom 5: Uraian definisi operasional dari Uraian DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
6. Kolom 6: nilai data atau capaian pada tahun data.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTFI



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196709221989031004

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).